

**PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATAN
JUMLAH ANGGOTA**

(Studi BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung)



Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna
Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

ANISA ROZIANA

Npm : 1451020016

Program Studi : Perbankan Syari'ah

Pembimbing I : Ahmad Habibi, S.E., M.E

Pembimbing II: Is Susanto, M.E.Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439H/2018M**

ABSTRAK

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan Dewan yang harus dimiliki oleh Lembaga Keuangan Syari'ah, baik bank maupun non bank. DPS tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syari'ah, Sehingga tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah yang telah disahkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN. Salah satunya pada akad jual beli atau yang disebut dengan akad *Murabahah* yang dilakukan pada BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung agar sesuai dengan syari'ah sehingga meningkatnya minat anggota.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap peningkatan anggota. Pada produk pembiayaan *Murabahah*, dan bagaimana peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap peningkatan anggota pada pembiayaan *Murabahah* di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung dalam Perspektif Islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifatnya yaitu Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Interview, Observasi, dan Dokumentasi. Metode pengelolaan data yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan pengelolaan data penelitian ini yaitu memeriksa data (*Editing*) dan pengkodean (*Coding*).

Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu Dewan Pengawas Syari'ah berupaya mengawasi produk pembiayaan BMT terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Fatwa DSN-MUI yang samapai sejauh ini terkait dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) *murabahah*. Produk yang paling di minati di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung yaitu produk *Murabahah* karena membiayai usaha pedagang-pedagang kecil. Dewan Pengawas Syari'ah dalam perspektif Islam telah melaksanakan perannya dengan pembiayaan *murabahah*. Mengawasi kehalalan akad *murabahah* pada BTM BiMU dan BMT Fajar Bandar Lampung dengan melaksanakan pada aturan-aturan syariat Islam. Serta melakukan pengawasan terhadap proses pembiayaan yang cepat dan jaminan yang tidak memberatkan anggota pada pengambilan produk pembiayaan *murabahah*. Sehingga naiknya minat anggota dalam pengambilan produk pembiayaan *murabahah* di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung membuat naiknya pendapatan BMT itu sendiri.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya
maka sekripsi saudara :

Nama : Anisa Roziana

NPM : 1451020016

Prodi Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul skripsi : **PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH
TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM
MENINGKATAN JUMLAH ANGGOTA**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 10 November 2018

Pembimbing I,

Ahmad Habibi, S.E., M.Si

NIP. 197905142003121003

Pembimbing II,

Is Susanto, M.E.Sy.

NIP.

**Kepala Jurusan
Perbankan Syariah**

Ahmad Habibi, S.E., M.Si

NIP. 197905142003121003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama 1 Bandar Lampung telp.

(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATAN JUMLAH ANGGOTA** (Studi BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung) , disusun oleh : **Anisa Roziana**
NPM : 1451020016, Jurusan Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa, 30 Oktober 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

: Dr. M. Bahrudin, M.Ag

(.....)

Sekretaris

: Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek

(.....)

Penguji 1

: Drs. H. Nasrudin, M.Ag

(.....)

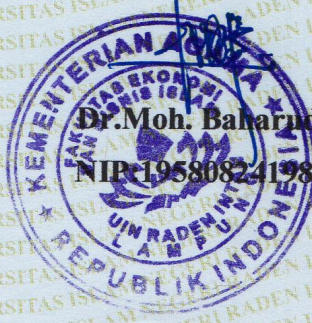
Penguji 2

: Is Susanto, M.E.Sy.

(.....)

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Moh. Baharudin, M.A
NIP.195808241989031003

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : *“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung. “* (QS. Al-Jumu’ah 10).¹



¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Depag RI, 2005) , h. 282.

PERSEMBAHAN

Sebuah langkah usai satu cita telah ku gapai. Namun, itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari awal perjuangan . kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu senantiasa mendampingiku dan tak kekang oleh waktu. Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kepada Orang Tua tercinta Ayahanda A.Rozi dan Ibunda Murhana. Yang telah membesarkan, mendidik, mendukung, menyemangati, dan selalu mendoakan anaknya hingga saat ini.
2. Terimakasih kepada kakak kandungku Ratomy Rohim, Adrian Haris, dan adikku Aliya Roziana yang selama ini telah mendo'akan ku dan menjadi motivasi ku.
3. Terimakasih kepada bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku dosen pembimbing 1 yang tidak pernah lelah memberikan masukan dalam skripsi ini.
4. Terimakasih untuk semua sahabat-sahabatku Ratu Desta, Wulandari, Tia Destiana, Firstella Apnizar, Martin Fajar, Nurelita, dan Rima Puspita Dewi dan teman-teman Perbankan Syariah C angkatan 2014 yang telah membantuku selama 4 tahun ini dan selalu memberikan semangat motivasi dalam penelitian ini dan selalu memberikan inspirasi untukku. Selalu menjadi sahabat yang terbaik dari sekarang hingga saat ini.

5. Terima kasih juga untuk Zandra Irawan yang selalu memberikan banyak nasehat, inspirasi dan semangat yang tidak pernah lelah untuk selalu mengingatkan ku dalam proses penelitian ini agar cepat sarjana.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menjadi kebanggaan ku.



RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung pada tanggal 5 Januari 1996, yang merupakan putri ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda A.Rozi dan Ibunda Murhana.

Berikut riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan penulis yaitu :

1. TK Tunas Karya, Jagbaya 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2001.
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Penengahan kec. Kedaton BandarLampung, selesai pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri di SMPN 22 BandarLampung Kec. Rajabasa BandarLampung selesai pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri di SMAN 5 BandarLampung kec. Wayhalim BandarLampung selesai pada tahun 2014.
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan Universitas di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syari'ah angkatan ke 2 jurusan Perbankan syari'ah.

Selama Menjadi Mahasiswi penulis aktif dibeberapa kegiatan antara lain : sebagai kader pada Organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) komisyariat syari'ah Uin Raden Intan Lampung, Dan Bendahara HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Perbankan Syari'ah Uin Raden Intan Lampung pada tahun 2016-2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARI’AH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATAN JUMLAH ANGGOTA (studi BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung)”

Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yaitu agama Islam.

Penulis menyadari sebagai manusia biasa penulis tidak terlepas dari kesalahan dan keterbatasan . kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak niscaya skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh sebab itu melalui skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bapak Dr. Moh. Bahrudin, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Intan Lampung.
2. Bapak Ahmad Habibi. S.E. M.E selaku ketua Jurusan Perbankan Syari’ah dan selaku dosen pembimbing 1 yang tidak pernah lelah memberikan masukan dalam skripsi ini, dan Bapak Is Susanto, M.E.Sy. yang selalu sabar mengarahkan dalam penelitian ini dan selalu memotivasiku agar cepat selesai.

3. Direktur BTM BiMU Bandar Lampung Bapak Ahsanal Huda, S.P yang telah memberikan izin penelitian di BMT BiMU Bandar Lampung, dan serta jajarannya selaku karyawan BTM BiMU Bandar Lampung yang selalu baik dan ramah memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam skripsi ini.
4. Kepala Cabang BMT Fajar Bandar Lampung Bapak Andi Cahyono yang telah memberikan izin penelitian di BMT Fajar Bandar Lampung , dan serta jajarannya selaku karyawan BMT Fajar Bandar Lampung yang selalu baik dan santun saat penulis menanyakan tentang produk BMT Fajar dan selalu memberikan data-data yang penulis butuhkan seelama penulisan skripsi ini.
5. Ayah dan mama tercinta , kakak dan adikku, serta teman-teman yang tidak pernah lelah membantu penulis. Sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas dan menjadikan amal shaleh kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini amin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca dan penulis mohon maaf atas kekurangan dan kepada Allah SWT penulis mohon ampun.

Bandar Lampung, 13 November 2018
Penulis

Anisa Roziana
NPM : 1451020016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
F. Batasan Masalah	12
G. Metode Penelitian.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syari'ah	
1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah	24
2. Mekanisme Pengangkatan Anggota DPS	28
3. Dewan Syari'ah Nasional	30
4. Fatwa DSN-MUI Fatwa Produk LKM Syari'ah.....	32
5. Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam kepatuhan Syari'ah	35
B. <i>Murabahah</i>	
1. Pengertian Pembiayaan	37
2. Pembiayaan Murabahah	42
3. Landasan Syari'ah dan Fatwa tentang Murabahah.....	43
4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah.....	45
5. Tujuan dan Manfaat Murabahah.....	46
6. Prosedur Pembiayaan Murabahah	50
C. Tinjauan Umum BMT	
1. Pengertian BMT	52
2. Dasar Hukum BMT	52
3. Prinsip-prinsip BMT.....	54
4. Prinsip-ptinsip Operasional BMT.....	54

5. Akad dan Sumber dana BMT	56
6. Prosedur BMT	60
7. Penerapan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengaws Syari'ah	64
8. Pengaruh Dewan Pengawas Syari'ah terhadap Anggota.....	77

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya BTM BiMU Bandar Lampung	69
2. Visi Dan Misi BTM BiMU Bandar Lampung	70
3. Struktur Organisasi BTM BiMU Bandar Lampung	71
4. Produk-produk Layanan BTM BiMU Bandar Lampung	73
5. Hasil Wawancara BTM BiMU Bandar Lampung.....	76
B. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya BMT Fajar Bandar Lampung	81
2. Visi Dan Misi BMT Fajar Bandar Lampung	83
3. Struktur Organisasi BMT Fajar Bandar Lampung.....	85
4. Produk-produk Layanan	87
5. Hasil Wawancara BMT Fajar Bandar Lampung.....	91

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> dalam meningkatkan jumlah anggota di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung	97
B. Peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> dalam meningkatkan jumlah anggota di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung dalam Perspektif Islam.....	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “PERANAN DEWAN PENGAWAS SYARI’AH TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM MENINGKATAN JUMLAH ANGGOTA (Studi BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung)” untuk menghindari kesalahan pahaman, maka perlu adanya penegasan judul tersebut :

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa¹
2. Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap produk syari’ah dalam kegiatan usaha bank syari’ah DPS wajib dibentuk di bank umum syari’ah atau bank umum yang membuka unit usaha syari’ah keanggotaan DPS berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang. Anggota DPS berdasarkan peraturan digolongkan sebagai terafiliasi.²
3. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), h. 1051.

² Gubron Safiniah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari’ah*, (Jakarta: Renais, 2007), h. 17.

4. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjualan dan pembeli.
5. Peningkatan adalah suatu proses perbuatan meningkat, yang berarti proses perubahan menjadi lebih baik.³
6. Jumlah adalah berarti banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu)
7. Anggota adalah orang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan.⁴
8. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) adalah Lembaga Keuangan Makro Syari'ah yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi syari'ah dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan anatara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.⁵
9. Baitut Tamwil Muhammadiyah didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Provinsi Lampung sejak bulan Febuari

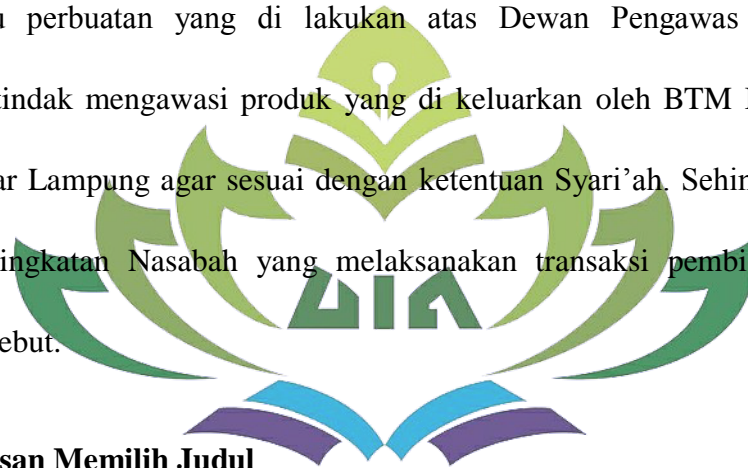
³ *Op. Cit*, h. 1076.

⁴ *Ibid*, h. 265.

⁵ Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 231.

2004 dengan nama Koperasi Syari'ah BTM Bandar Lampung.⁶ Dan BMT Fajar Lampung dirintis sejak tahun 1996 bermula tergabung pada Yayasan bina sejahtera. Setelah mengalami masa embrional sejak tahun 1996. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi.⁷

Berdasarkan penegasan judul di atas dapat di tegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini yaitu suatu kajian tentang tindakan atau perbuatan yang di lakukan atas Dewan Pengawas Syari'ah yang bertindak mengawasi produk yang di keluarkan oleh BTM BiMU dan Bmt Fajar Lampung agar sesuai dengan ketentuan Syari'ah. Sehingga mengalami Peningkatan Nasabah yang melaksanakan transaksi pembiayaan di BMT tersebut.



B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan judul tersebut untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Penulis ingin meneliti hal tersebut karena berkembangnya lembaga keuangan syari'ah memerlukan adanya lembaga khusus yang mengawasi prinsip-prinsip syari'ah, maka diperlukan Dewan

⁶ Arsip Kspps BTM BiMU Bandar Lampung

⁷ Profilbmtfajar.blogspot.co.id/, pukul 05.00, 18 april 2018.

Pengawas Syari'ah untuk menjaga kepatuhan syari'ah pada BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bamdar Lampung.

- b. Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini cukup tersedia dan mendukung sehingga diperkirakan dalam penyusunan skripsi dapat diselesaikan.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan dalam judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan penulis yaitu Perbankan Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dan tersedianya referensi dan informasi yang penulis butuhkan terkait dengan judul yang diteliti, baik informasi langsung dan BMT maupun perpustakaan serta media lainnya sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- b. Adanya motivasi untuk turut serta dalam menyumbangkan pemikiran berupa karya ilmiah yang bermanfaat bagi kemaslahatan umum dalam membangun kemandirian masyarakat.

C. Latar Belakang Masalah

Dunia modern sekarang ini sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Tugas utama sistem keuangan adalah mengalihkan dana yang tersedia (*loanable funds*) dari penabung kepada pengguna dana untuk kemudian digunakan membeli barang dan jasa-jasa disamping untuk investasi sehingga ekonomi

dapat tumbuh dan meningkatkan standar kehidupan. Oleh karena itu, sistem keuangan memiliki peran yang sangat prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Berbagai studi menunjukkan bahwa sistem keuangan memainkan peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang disuatu negara, bahkan perkembangan sistem keuangan mampu memprediksi perkembangan ekonomi ke depan.⁸ Lembaga Keuangan Syari'ah salah satunya yaitu *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Lembaga keuangan non bank yang berbasis syari'ah.

Salah satunya BMT yang ada di Bandar Lampung yang merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) atau *Baitul Mall wa Tamwil* yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip syari'ah tujuan utama dari lembaga ini adalah menyediakan permodalan bagi masyarakat yang melakukan usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sangat banyak tetapi kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal seperti bank.⁹

Baitut Mal Wat Tamwil adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Pendirian BMT didesain untuk bermitra dengan usaha-usaha mikro yang tidak bisa dijamah oleh perbankan baik konvensional maupun syari'ah. Selama ini perbankan masih kesulitan untuk mengalirkan dananya ke usaha mikro hal ini karena jenis usaha di nilai kurang

⁸Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 10.

⁹ Warkum Sumitra, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait BMI Dan Takaful Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.250.

ekonomis untuk mendapatkan pembiayaan dari bank, belum lagi karena berbagai kendala seperti masalah agunan serta kondisi administrasi keuangan yang dinilai kurang memenuhi syarat.¹⁰ Salah satu BMT yang ada di Bandar Lampung yaitu BMT Fajar Bandar Lampung.

BMT Fajar dirintis sejak tahun 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: Mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil atau mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek Rentenir. Karena dipandang perlu adanya lembaga keuangan syari'ah sebagai alternatif solusi tersebut, dan munculnya , untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syari'ah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil atau mikro dana BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT.¹¹ Selain BMT Fajar adapun lembaga keuangan syari'ah seperti BTM yang merupakan amal usaha muhammadiyah Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU yang didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah Provinsi Lampung.

Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU merupakan Amal usaha Muhammadiyah yang mandiri dalam bidang ekonomi. Baitut Tamwil Muhammadiyah didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan

¹⁰*Ibid*, h. 252.

¹¹ Arsip Kspps BMT Fajar Bandar Lampung.

Muhammadiyah Provinsi Lampung sejak bulan Febuari 2004 dengan nama koperasi syari'ah BTM Bandar Lampung, Namun sesuai dengan peraturan Kementrian Koordinator, pada RAT TB 2015 berubah menjadi KPPS BTM BiMU yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama.¹² BTM merupakan lembaga keuangan syari'ah yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penjualan. salah satunya yaitu akad jual beli yang disebut dengan *Murabahah*.

Berikut ini adalah firman Allah SWT yang menjelaskan bahwa Al-quran sebagai pedoman dan pelita bagi manusia. Dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10, yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung. “ (QS. Al-Jumu'ah 10).¹³

Pembiayaan *Murabahah* merupakan penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjualan berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang di masukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari

¹²Arsip Kspps BTM BiMU Bandar Lampung

¹³ Junus Muhammad, *Terjemahan AL-Quran karim*, (Bandung: PT Al-Ma'arif), h. 115.

transaksi *murabahah* haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif. Oleh karena itu sudah seharusnya bahwa penjual menanggung resiko kepemilikan sebelum menjual komoditas tersebut kepada pembeli atau konsumen.¹⁴

Data 3 tahun terakhir BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung terdapat perbedaan Jumlah nasabah pada pembiayaan *Murabahah* yaitu dapat di lihat di table berikut:

Tabel I
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*

Tahun	BTM BiMU Bandar Lampung	BMT Fajar Bandar Lampung
2015	1305 Nasabah	255 Nasabah
2016	880 Nasabah	156 Nasabah
2017	733 Nasabah	106 Nasabah
Jumlah	2918 Nasabah	517 Nasabah

Sumber: Data BMT BiMU dan BMT Fajar Bandar Lampung

Berdasarkan tabel 3 tahun terakhir di atas BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung pada pembiayaan *Murabahah* dapat di lihat mengalami penurunan tiap tahunnya. BTM BiMU Bandar Lampung jumlah anggota pada tahun 2015 yaitu 1305 nasabah, pada tahun 2016 yaitu 880, dan pada tahun 2017 yaitu 733. Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Fajar Bandar Lampung pun mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu 225 nasabah, pada tahun 2016 yaitu 156 nasabah, dan pada tahun 2017 yaitu 106 nasabah.

¹⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007),h 164.

Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syari'ah adalah regulasi tentang kepatuhan syari'ah (*sharia compliance*). Kepatuhan syari'ah adalah bagian penting bagi industri keuangan dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya. Hal ini di dukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bagi setiap institusi keuangan berbasis Syari'ah. Dewan Pengawas Syari'ah bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan lembaga yang harus dimiliki oleh Lembaga Syari'ah, termasuk Perbankan Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Peran utama DPS menurut Syafe'i Antonio ialah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah.¹⁵ Dewan Pengawas Syari'ah memiliki fungsinya masing-masing, khusus Dewan Pengawas Syari'ah, tugasnya ialah mengawasi jalannya operasional Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah supaya tidak terjadi penyimpangan atas produk dan jasa bank syari'ah yang telah disahkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) melalui fatwa DSN. Dewan Pengawas Syari'ah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) diangkat oleh rapat umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas

¹⁵M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 234.

Syari'ah (DPS) wajib di bentuk oleh Bank Umum Syari'ah dan unit usaha syari'ah. Produk yang ditawarkan oleh bank syari'ah tidak boleh menyimpang dari aturan syari'ah yang telah dituangkan dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah Dewan Syariah yang tugasnya ialah untuk meneliti produk syari'ah yang akan diluncurkan dan memberikan fakta tentang produk dan jasa syari'ah.¹⁶

Lembaga Keuangan Syari'ah sangat membutuhkan Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi operasional atau praktik yang terjadi di lapangan yang sesuai atau tidaknya pada kepatuhan syari'ah yang telah di fatwakan dan telah di tetapkan pada MUI. Salah satunya pada akad jual beli atau yang disebut dengan akad *Murabahah* yang di lakukannya agar sesuai dengan syari'ah sehingga meningkatnya minat anggota.

Berdasarkan Fenomena di atas penyusunan tertarik untuk memilih judul penelitian **“Peranan Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Pembiayaan Murabahah dalam Peningkatan Nasabah (Studi BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung)”**.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan jumlah anggota di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung ?

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 37.

2. Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syari'ah terhadap pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan jumlah anggota di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung dalam Perspektif Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan jumlah anggota di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui Peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan jumlah anggota di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung dalam Perspektif Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang Peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan jumlah anggota.
- b. Secara Praktis penulis meneliti sejauh mana Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi Lembaga Keuangan sehingga berpengaruh atau tidaknya dalam peningkatan anggota. Bagi pihak lain Sebagai

sumber informasi dalam melakukan penelitian khususnya pada kajian yang sama berkenaan dengan Peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan jumlah anggota di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung pada Lembaga Keuangan Syari'ah (BMT).

F. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dan penelitian ini adalah :

1. Objek penelitian ini yaitu Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syari'ah BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung, khususnya tentang pengawasan terhadap kepatuhan syari'ah Lembaga Keuangan Syari'ah.
2. Pembahasan yang dilakukan ini produk pembiayaan dari penelitian ini adalah produk *Murabahah* di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.¹⁷

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 2.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian ini

Jenisnya penelitian ini bersifat kualitatif karena metode penelitiannya berdasarkan pada data yang ditemukan di lapangan (*field research*).¹⁸ Menurut pengertiannya tentang hal yang terjadi pada masyarakat dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini nantinya akan di analisis, maka dalam prosesnya penelitian ini akan mengangkat permasalahan yang ada di lapangan. Selain penelitian lapangan, penelitian juga menggunakan penelitian pustaka, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan bacaan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan mengembangkan secara tepat sifat-sifat sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.¹⁹ Sedangkan metode berpikirnya menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode untuk menarik kesimpulan yang berhubungan dengan suatu permasalahan dari prinsip-prinsip umum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian membahas dan

¹⁸ *Ibid*, h. 8.

¹⁹ Kuntjopuningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 42 .

mencocokkannya dengan khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan aspek yang diteliti.²⁰

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel 1.2
Jumlah Anggota

Lembaga Keuangan Syari'ah	Jabatan	
	DPS	Nasabah
BTM BiMU Bandar Lampung	2 Orang	2918 Orang
BMT Fajar Bandar Lampung	2 Orang	517 Orang
Jumlah Populasi	4 Orang	3435 Orang

Sumber : Data BMT BiMU dan BMT Fajar Bandar Lampung

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini terdiri dari Dewan Pengawas Syari'ah dan Nasabah pembiayaan produk *Murabahah*. Populasi pada BTM BiMU Bandar Lampung terdiri dari 2 Orang DPS dan 2918 Orang Nasabah pada produk *Murabahah* dan pada BMT Fajar Bandar Lampung terdiri dari 2 Orang DPS dan 517 Orang Nasabah produk *Murabahah*. Jadi, jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 3439 orang.

²⁰ *Ibid*, h. 43.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang di jadikan subjek penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi.²¹ Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat ditarik sampel dengan Cara pengambilan sampel yakni apabila subjek kurang dari 100 lebih baik sampel di ambil semua. Jika subjek lebih dari 100 maka sampel di ambil antara 10%-15% atau 20%-25% dari jumlah total populasi.²²

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam hal ini penulis akan mengambil 10% dari jumlah populasi yang ada yaitu $10\% \times 3.435$ Nasabah selama 2015-2017. Cara penentuan yang digunakan peneliti adalah *purposif sampling* yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Dikarenakan keterbatasan penulis dalam mengelola data. Maka, penulis tidak menggunakan data secara keseluruhan untuk di olah. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposif Sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Nasabah aktif dalam melakukan Transaksi.
- 2) Memiliki karakter yang jujur dan keterbukaan kepada BMT.
- 3) Tidak mengalami kemacetan angsuran setiap bulannya saat melakukan pinjaman.
- 4) Memiliki peringkat yang baik dalam menjadi anggota.

²¹Soepardi, *Op Cit*, h. 103.

²²Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), h. 270.

- 5) Analisis kredit harus bisa memastikan pemohon memiliki sumber-sumber penghasilan yang memadai untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- 6) Tanggung jawab debitur terhadap kelancaran pembayaran angsuran kreditnya yang lama.

Berdasarkan kriteria diatas maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria di atas terdiri dari 4 DPS dan 18 Nasabah. Teknik pengambilan sampel dalam proses penelitian kualitatif, penentuan sampel lebih cepat menggunakan sistem nonprobability sampling, karena penelitian kualitatif ukuran populasi tidak terhingga. Dalam penelitian ini menggunakan salah satu teknik *nonprobability* sampling yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Pertimbangan atau tujuan tertentu ini misalnya orang, informan atau responden tersebut dianggap tau atau mewakili tentang apa yang akan di ungkap dalam penelitian.²³

3. Data dan Sumber data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh pada penelitian ini akan di bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode data yang digunakan sebagai berikut :

²³*Ibid*, h. 402.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.²⁴ Data yang diperoleh oleh penulis berasal dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder. Data yang berkaitan dengan peran DPS terhadap transaksi *Murabahah* terhadap peningkatan anggota di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Selain data primer sebagai pendukung, dalam penelitian ini penulis juga memperoleh lewat pihak lain secara tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Data ini dapat berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Adapun data sekunder yang digunakan dalam pembahasan ini adalah literatur kepustakaan tentang permasalahan peran DPS terhadap kesesuaian DSN-MUI. Study pustaka dimaksudkan dapat menjadi dasar penelitian ini, kerangka pemikiran atau teori maupun proses penelitian hasil lapangan.²⁵

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian disebut juga informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan

²⁴Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran*, (Jakarta: Asdi Mahastya, 2003), h. 20.

²⁵ Pabudu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2006), h. 57.

kondisi dari latar penelitian.²⁶ Subjek penelitian ini adalah DPS terhadap transaksi *Murabahah* untuk meningkatkan pendapatan BTM BiMU Lampung dan Fajar Bandar Lampung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

a. *Metode Interview* (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.²⁷

b. *Metode Observasi* (Pengamatan)

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁸

Teknik observasi yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi secara langsung peristiwa atau kejadian untuk menjawab

²⁶ Lexy. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 132.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 137.

²⁸ *Ibid*, h. 145.

pertanyaan penelitian .Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri secara langsung pada pelaksanaan Peranan Dewan Pengawas Syari'ah terhadap Peningkatan anggota (BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung).

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁹ Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data yang bersumber pada dokumentasi tertulis yang sesuai dengan kebutuhan peneliti.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya yaitu mengolah data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksa data (*Editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat

²⁹*Ibid*, h. 240.

- pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.
- b. Pengkodean (*coding*), yaitu mengklasifikasi data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data-data sesuai.
 - c. Hasil (*Sistemazing*), yaitu mengeluarkan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menetapkan data sesuai dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁰

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya di kembangkan pola

³⁰ Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 75.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 243-244.

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.³² dalam penganalisis data yang penulis kumpulkan digunakan metode analisis data yang teritik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian di tarik kesimpulan secara umum. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian.

Analisis data adalah menganalisis data untuk mengambil kesimpulan.³³ Analisis data ini sendiri dilakukan dalam tiga cara yaitu :

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang direduksi dapat memberi gambaran yang telah lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi data merupakan proses pembinaan, pemusatan, perhatian, pengabstakan dan pertransformasikan data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian mengumpulkan data selanjutnya.³⁴

Proses ini berlangsung dari awal hingga akhir penelitian selama penelitian ini di laksanakan. Fungsinya untuk menejamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan

³²Kaelan, *Op Cit*, h. 336.

³³ Usman Husaini, *Metode Sosial* , (Bandung: Bumi Aksara, 2007), h. 81.

³⁴*Ibid*, h. 82.

mengorganisasikan hingga interpretasi hingga di tarik yang disesuaikan dengan data-data yang relevan atau data yang sesuai dengan tujuan pengambilan data di lapangan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.³⁵

b. Display data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informain yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan mengambil tindakan, yang disajikan antara lain dalam bentuk teks naratif, matriks, dan bagan.³⁶

Data yang telah di reduksi selanjutnya di paparkan. Pemaparan di lakukan merupakan langkah ke dua setelah reduksi data guna memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) terhadap pembiayaan *Murabahah* pada BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan satu bagian dari konfigurasi yang utuh. Makna yang muncul dari data uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, dikelompokan yang telah terbentuk,

³⁵*Ibid*, h. 83.

³⁶*Ibid*, h. 289.

kemudian melaporkan hasil penelitian secara lengkap mengambil kesimpulan melalui reduksi data bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Produk BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.³⁷



³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R dan D*, (Bandung: Alphanetha, 2010), h. 9.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

1. Pengertian Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Surat keputusan Dewan Pengawas Syari'ah Nasional No 3 Tahun 2000 bahwa DPS adalah bagian dari lembaga keuangan mikro syari'ah yang bersangkutan dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS adalah suatu yang mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan mikro syari'ah.¹

Dewan Pengawas Syari'ah adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah. Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan dan lembaga keuangan syari'ah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian bank dan lembaga keuangan syari'ah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam yang harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah.² Dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah merupakan pengawasan dalam perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah yang mengawasi produk yang dikeluarkan oleh perbankan syari'ah dan

¹ Ghufroon Safiniah, *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syari'ah*, (Jakarta: Renais, 2007), h. 17.

² *Ibid*, h. 18.

lembaga keuangan syari'ah sesuai atau tidaknya dengan Dewan Syari'ah Nasional.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan Dewan Pengawas Syari'ah tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatan DPS dalam program sosialisasi atau promosi pada penduduk lokal, perlu ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan rekomendasi tersebut, keberadaan Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tampaknya masih perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknik masing-masing. Hal ini dianggap penting agar para anggota DPS yang ditempatkan di lembaga keuangan syari'ah itu dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya perusahaan dapat secara murni sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³

Sebagaimana dapat diperiksa pada keputusan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 03 Tahun 2000, tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah adalah :

- a. Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan Prinsip Syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- b. Fungsi utama Dewan Pengawas Syari'ah yaitu sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syari'ah dan Sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan

³ Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta:Setara press, 2015), h. 92.

lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional.

- c. Fungsi pengawasan DPS berlangsung sejak produk yang dikeluarkan oleh lembaga yang diawasinya berjalan hingga akad tersebut selesai, hal ini berguna karena untuk menghindari penyimpangan yang sering terjadi pada akad tersebut di buat, baik dari para pihak maupun dari pelaksanaan isi akad.⁴

Adapun kewajiban anggota Dewan Pengawas Syari'ah Sebagaimana tercantum kepada keputusan Dewan Syari'ah Nasional tersebut yaitu:

- 1) Mengikuti fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional.
- 2) Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari prinsip syari'ah yang telah di fatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- 3) Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada Dewan Syari'ah Nasional, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.⁵

Dari uraian di atas, dapat dilihat beberapa objek pemeriksaan Dewan Pengawas Syari'ah, yaitu :

- 1) Tentang keberadaan ciri khas akad syari'ah.
- 2) Tentang pemenuhan persyaratan waktu akad.
- 3) Tentang pemenuhan persyaratan para pihak dalam akad.
- 4) Tentang pemenuhan persyaratan objek pembiayaan.
- 5) Tentang pemenuhan persyaratan perhitungan margin pada akad murabahah, Salam, Ostisna, dan Ijarah.

⁴ Barlitik Sukma.Dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum UI), h. 86.

⁵ *Ibid*, h. 93.

- 6) Tentang pemenuhan persyaratan adanya persetujuan (ijab-qabul) para pihak.
- 7) Tentang pemenuhan persyaratan pembelian kepada pemasok.
- 8) Tentang kepatuhan para pihak kepada akad.
- 9) Tentang kebenaran fungsi angunan.
- 10) Tentang penyelesaian sengketa.

Dewan Pengwas Syari'ah mempunyai tugas, fungsi, kewajiban, tanggung jawab cukup berat, luas, dan banyak. Untuk melakukan tabulasi dari sampling diambil pada pemeriksaan kepatuhan kepada prinsip syari'ah saja cukup banyak sehingga diperlukan paling tidak satu orang tenaga administrasi. Tenaga administrasi atau disebut *syari'ah liaison officer* ini perlu disediakan oleh Bank Syari'ah dari karyawannya yang memenuhi syarat. Akan lebih baik apabila jabatan syari'ah *liaison officer* ini dimasukkan ke dalam jenjang karier pada bank syari'ah dan nantinya menjadi salah satu syarat seseorang yang akan mendukung jabatan struktural pada bank yang bersangkutan. Pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syari'ah ini sangat berbeda sekali dengan bank konvensional, pembinaan dan pengawasannya hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Tetapi pada perbankan syari'ah, selain dilakukan oleh Bank Indonesia, pembinaan dan pengawasannya juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang bertujuan untuk memantau terhadap kegiatan usaha yang di

lakukan oleh perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah, apakah bertentangan dengan aspek syari'ah atau tidak.⁶

Kedudukan DPS dalam struktur kepengurusan diangkat dengan Dewan Komisaris pada bank. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas dari setia pemasukan dari Dewan Pengawas Syari'ah kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN yang merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia berdasarkan surat keputusan MUI No Kep.754/11/1999 dengan 4 tugas utama yaitu :

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan Fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan Fatwa atas produk jasa keuangan Syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan Fatwa yang telah dikeluarkan. Keberadaan Rapat umum pemegang saham merupakan bagian dari struktur pengawasan bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah dilakukan atas dasar musyawarah.⁷

2. Mekanisme Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

- a. Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah kepada dewan komisaris
- b. Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota dewan pengawas syari'ah kepada direksi
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi komisaris, rapat direksi menetapkan calon anggota dewan pengawas syari'ah untuk dimintakan rekomendasi rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia.

⁶ *Ibid*, h 94.

⁷ Harahap Sofyan, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Tim Quantum, 2002), h.

- d. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- e. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah.
- f. Rapat umum pemegang saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

Dalam hal pengangkatan calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah oleh rapat umum pemegang saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank Indonesia, maka pengangkatan tersebut baru efektif jika anggota DPS tersebut telah di setujui oleh Bank Indonesia.⁸

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS maka diperlukan langkah memperdayakan, baik dalam sisi kompetensi, integrasinya maupun independensinya (cara pengawasan) langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memerhatikan kondisi kesiapan institusi lembaga keuangan dan sumber daya insani Dewan Pengawas Syari'ah.

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian anggota operasional bank dan lembaga keuangan mikro syari'ah oleh Dewan Syari'ah Nasional
- b. Menilai aspek syari'ah terhadap operasional, dan produk yang dikeluarkan oleh bank dan institusi lembaga keuangan.
- c. Memberikan opini dan aspek syri'ah terhadap pelaksanaan operasional bank intitusi lembaga keuangan secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank dan institusi lembaga keuangan.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk menilai fatwa kepada DSN.

⁸ Surat Edaran No. 12/13/Dpbs/2010 tentang Pelaksanaan *Good Coporate Government* bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syari'ah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia.⁹

3. Dewan Syari'ah Nasional

a. Pengertian Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas keuangan syari'ah. Pada awalnya tahun 1999 DSN secara resmi didirikan sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bertugas mengawasi dan mengayomi jalannya operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah selain itu juga harus menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah yang ada pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

b. Tugas dan Wewenang DSN (Dewan Syari'ah Nasional) :¹⁰

1. Tugas Dewan Syari'ah Nasional

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa dan jenis-jenis kegiatan keuangan.

⁹ Wirdyningsih Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prananda Media, 2005), h. 83.

¹⁰ Surat Keputusan Dewan Syari'ah Nasional No. 1 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dasar Dewan Pengawas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia

- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang di keluarkan.

2. Wewenang Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syari'ah dimasing-masing lembaga keuangan syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturanyang di keluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Depertemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan Rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syari'ah pada suatu lembaga keuangan syari'ah.
- d. Mengundang pada ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas menoter atau lembaga keuangan dalam, maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syari'ah untuk menghentikan penyimpangan dan fatwa yang telah di keluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak di indahkan.



3. Fatwa DSN-MUI Tentang Fatwa Produk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Berdasarkan SK Dewan MUI tentang pembentukan DSN No. 750 MUI/ 177 1999, Salah satu tugas dan wewenang DSN adalah mengeluarkan Fatwa. Fatwa adalah suatu perkataan bahasa arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai suatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahui.¹¹

Dengan demikian fatwa berarti menerangkan hukum Allah dengan berdasarkan pada Al-Quran secara umum dan menyeluruh sebagai berikut adalah landasan tentang Fatwa, yang berbunyi :

a. Al-Qur'an An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أُنثَىٰ فَلَهَا النِّصْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضْلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari)

¹¹ Susanto Burhanudin, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2008), h.

*Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu” . (QS. AN-Nisa :176).*¹²

Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan penting dalam upaya mengembangkan produk hukum lembaga keuangan mikro syari’ah kedudukan Fatwa DSN-MUI mempunyai posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi dan lembaga keuangan Mikro Syari’ah. Karena dalam pengembangan ekonomi dan perbankan syari’ah mengacu dalam sistem hukum yang berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist yang berfungsi sebagai pedoman utama.

Fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi dan perbankan syari’ah dikeluarkan atas pertimbangan Badan pelaksanaan harian yang membidangi ilmu syari’ah dan ilmu perbankan. Tugas pembentukan Dewan Pengawas Syari’ah adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syari’ah yang ada dalam lembaga keuangan.¹³

Dewan Syari’ah Nasional merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syari’ah di seluruh dunia. Di Indonesia peran ini di jalankan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang di bentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan pimpinan

¹² Junus Muhammad, *Terjemahan AL-Quran Karim*, (Bandung: PT Al:Ma’arif), h. 200.

¹³ *Ibid*, h. 78-80.

MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 1999. MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah wadah atau majlis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendikiawan Muslim Indonesia untuk menyatukan gerakan dan langkah-langkah umat Islam Indonesia yang mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395H, bertepatan pada tanggal 27 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dan pertemuan atau *musyawarah* para ulama, cendikiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan 5 fungsi dan peran utama MUI yaitu :

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya).
- b. Sebagai pemberi Fatwa.
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadin al ummah).
- d. Sebagai gerakan Islam *wa al tajdid*.
- e. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.¹⁴

Dewan Syari'ah Nasional adalah badan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, pembentukan fatwa bidang ekonomi syari'ah oleh DSN adalah untuk menghindari adanya perbedaan ketentuan yang dibuat

¹⁴ [www.mui.or.id/konten / mengenai-mui/sekitartentangkami](http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekitartentangkami)(diakses tanggal 27 maret 2018)

oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah.¹⁵

Dewan Nasional Syari'ah sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, menurut pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004, disebut bahwa Dewan Syari'ah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha bank dan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan Prinsip Syari'ah.¹⁶

a. Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam kepatuhan Syari'ah.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) pada perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah harus terdiri atas para pakar di bidang syari'ah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas Syari'ah wajib mengikuti Fatwa DSN-MUI yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan Fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa BMT dengan prinsip syari'ah. tugas utama

¹⁵ Yeni Salam Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2010), h. 2011.

¹⁶ *Ibid*, h. 2013.

Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan usaha Koperasi Syari'ah atau BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI Dewan Syari'ah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya termasuk, usaha, bank, asuransi dan reksadana.

Kepatuhan syari'ah oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah pemenuhan seluruh prinsip syari'ah dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Kepatuhan syari'ah adalah salah satu bagian dari sistem tata kelola syari'ah yang baik. Pengelolaan lembaga keuangan syari'ah tidak bisa terlepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syari'ah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat tidak boleh tanpa menerapkan prinsip-prinsip syari'ah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syari'ah dapat berdampak negatif pada kondisi bank itu sendiri karena berpotensi untuk menciptakan kegagalan bank atau *insolvency* yang dapat berakibat pada terganggunya sistem keuangan negara.

Selain itu, kepatuhan syari'ah juga merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan lembaga keuangan syari'ah yang memberikan kewajiban pada lembaga keuangan syari'ah untuk menjaga sekaligus meningkatkannya. Pemeliharaan tingkat kesehatan lembaga keuangan akan berbanding lurus dengan pemeliharaan

kepercayaan masyarakat, sehingga bila lembaga keuangan lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya, termasuk bila bank lalai menerapkan prinsip syari'ah, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut.¹⁷

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan

Aktifitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana bank dan juga BMT adalah pelepasan dana atau pembiayaan yang sering juga disebut dengan *lending-financing*. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukan aktifitas utama Lembaga Keuangan Syari'ah. Karena berhubungan untuk memperoleh pendapat. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”¹⁸

a) Penilaian pembiayaan

Dengan analisis kredit, diharapkan kredit menjadi berkualitas, di atas standars dan jauh di atas marjinal. Berikut adalah 5 prinsip pemberian kredit yang sering dikenal dengan 5 C'S *PRICIPLE OF CREDIT*. “5C” ini merupakan satu alat atau “*tool*” untuk melihat

¹⁷ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 80.

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), h.163.

sejauh mana kelayakan kredit yang akan diberikan kepada calon debitur dan dapat di pertanggungjawabkan. Salah satu keputusan kredit ditentukan oleh prinsip “5C”. Yaitu :¹⁹

1) *Character* (Karakter)

Karakter sangat menyangkut sifat debitur yang harus mempunyai iktikad baik dan komitmen yang tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani bersama antara pihak debitur dan pihak kreditur. Karena tidak diragukan lagi dan tidak bercacat. Sebagai gambaran ada beberapa sifat calon debitur yang akan menentukan karakter seperti

- a. Usia, pendidikan, status, dan kesehatan.
- b. Pengendalian emosi.
- c. Pergaulan, lingkungan, relasi, sosialisasi.
- d. Hobi atau kegemaran, relas, dan sosial.
- e. Kebiasaan baik atau buruk.
- f. Tanggung jawab terhadap kewajiban kepada semua pihak yang terhubung. Seperti contoh, ada hal-hal yang mengganggu dalam pengajuan kredit misalnya mempunyai kebiasaan buruk seperti penjualan, minuman keras, obat terlarang, dan lain-lain. Sifat-sifat di atas turut menentukan dalam penilaian karakter.

2) *Capital* (Modal)

Analisis digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon anggota terhadap usahanya sendiri. Jika calon anggotanya sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan lebih tidak yakin. Dan dapat dilihat juga apakah anggota

¹⁹ Maryanto Supriyono, *Buku pintar Perbankan*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2011), h. 161-165.

tersebut memiliki simpanan di BMT termasuk simpanan di lembaga keuangan lain. Apakah memiliki pengasilan tetap untuk pembayaran angsuran.

3) *Collateral* (Jaminan)

Merupakan jaminan berupa barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan suatu jaminan bagi calon anggota untuk mengajukan pembiayaan konsumtif pada BMT. Jaminan yang diberikan sesuai dengan besaran pembiayaan yang akan diberikan. Jaminan yang diberikan calon anggota biasanya berupa tanah, BPKB kendaraan, dan barang yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analisis pembiayaan dan dapat dijadikan pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika terjadi suatu resiko kegagalan dalam pembayaran pembiayaan, maka jaminan di pakai untuk penganti dari kewajibannya. Nilai jual jaminan harus bisa menutupi pembiayaan serta bagi hasil atau marginnya. Dan apabila nilai jaminan lebih, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.

4) *Capacity* (Kapasitas)

Analisis kemampuan manajemen untuk mengelola suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekarang dan mendatang. Poin ini meliputi pula kemampuan daya saing calon

debitur dalam memerangi kompetisi bisnis yang sangat ketat. Tentu ini berkaitan dengan pengalaman usaha, manajemen yang mapan (solid), pengaturan keuangan yang baik dan lain-lain.

5) *Condition* (Kondisi)

Analisis terhadap “kondisi” meliputi terhadap ekonomi (makro dan mikro) baik nasional, regional, maupun internasional, politik, perundang-undangan dan lain-lain. Pengaruhnya terhadap bisnis debitur yang sedang berjalan untuk masa sekarang dan masa mendatang.

Selanjutnya akan dilakukan penilaian kredit dengan metode

7 P sebagai berikut :

a) *Personality*

Penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b) *Party*

Merupakan pengklasifikasian nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank atau lembaga keuangan.

c) *Purpose*

Merupakan metode untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

d) *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai suatu usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi melainkan nasabah.

e) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah dalam mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitor maka akan semakin baik. Dengan demikian jika salah satu usahanya merugi maka dapat di tutupi dengan sektor lain.

f) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemanapun nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke

periode apakah akan tetap sama atau akan semakin banyak meningkat. Apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang, jaminan asuransi.²⁰

2. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, kata *Murabahah* berasal dari kata (Arab) *rababa*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah, wa baai’u asy-syai murabahatan*” yang artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual suatu barang yang memberi keuntungan. Secara istilah, menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha*), pengertian *murabahah* adalah “*al-bai bira’sil maal waribhum ma’lum*” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui.²¹

Murabahah dalam *fiqh Islam* yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 110-111.

²¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 180.

diinginkan.²² sedangkan menurut Muhammad Syafe'I antonio *murabahah* adalah jual beli barang atau jasa dengan harga asal dengan tambahan asal keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli oleh calon nasabah (*debitur*) dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang akan disepakati oleh calon nasabah.

Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsman* (harga).
- c) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.²³

3. Pembiayaan *Murabahah*

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan *Murabahah* yang harus di penuhi adalah sebagai berikut .²⁴

- a. *Murabahah* adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan marjin keuntungan yang di masukkan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan tangguh.
- b. Barang yang diperjual belikan haruslah barang-barang yang nyata dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit.
- c. Karena merupakan jual beli, maka komoditas yang menjadi objek jual beli dari transaksi *murabahah* haruslah berwujud, dimiliki oleh penjual, dan dalam penguasaan secara fisik atau konstruktif

²² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 81.

²³ *Ibid*, h. 82.

²⁴ Ascarya, *Op. Cit*, h.163-165.

(*constructive possession*). Oleh karena itu, sudah seharusnya bahwa penjual menanggung resiko kepemilikan (*risks of ownership*) sebelum menjual komoditas tersebut kepada pembeli atau konsumen.

- d. *Murabahah*, seperti layaknya jual beli lainnya, memerlukan adanya suatu penawaran dan pernyataan menerima (Ijab dan qabul) yang mencakup kesepakatan kepastian harga, tempat penyerahan, dan tanggal harga yang disepakati di bayar (dalam hal pembayaran secara tangguh).
- e. Dalam transaksi *murabahah* : penunjukan agen, bila ada, pembelian barang oleh atau untuk dan atas nama bank, dan penjualan akhir barang kepada nasabah seluruhnya harus merupakan transaksi yang independen satu sama lain dan harus di dokumentasikan atau di catat secara terpisah. Namun, suatu perjanjian menjual dapat mencakup seluruh kejadian dan dilakukan di muka serta dapat mencakup seluruh lkejadian dan dilakukan di muka serta dapat di buat pada saat akan memulai hubungan kesepakatan jual beli.
- f. *Invoice* yang di terbitkan oleh suplair adalah atas nama bank dan lembaga keuangan karena komoditas yang di beli oleh suatu agen adalah atas nama bank atau lembaga keuangan tersebut. Pembayaran harga komoditas lebih di utamakan dilakukan langsung oleh bank kepada suplair.
- g. Bila transaksi jual beli telah disepakati, maka harga jual yang ditetapkan tidak dapat berubah.
- h. Dalam perjanjian dapat dimasukan klausul dalam hal yang terjadi keterlambatan pembayaran atau default bahwa nasabah diharuskan membayar denda yang di hitung melalui presentase per hari atau per tahun dan penerimaan denda tersebut akan dibukukan dalam dana kebajikan pada bank. Penerimaan denda tidak diperkenankan untuk dipergunakan menjadi sumber penerimaan bank, tetapi hanya untuk tujuan kebajikan termasuk untuk proyek-proyek untuk peningkatan kondisi ekonomi dari pada fakir miskin atau dhuafa.
- i. Bank dapat meminta kepada pengadilan yang sesuai untuk mengambil alih aset agunan yang ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan kewenangannya, dan hanya boleh di ambil bank atau lembaga keuangan hanya biaya langsung dan biaya tidak langsung yang benar-benar telah dikeluarkan, Sedangkan *opportunity cost* tidak diperkenankan diganti. Agunan juga dapat di jual oleh bank tanpa investasi dari pengadilan.
- j. Nasabah dapat dimintakan untuk memberikan jaminan dalam bentuk serat sanggup, hipotek, lien, hak tanah, atau bentuk aset lainnya. Namun, bank selaku pemegang hak dari jaminan yang di agunkan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang diagunkannya seperti hak atas tanah ataupun hak surat tagihan.

- k. Kontrak *murabahah* tidak dapat *di-roll over* karena barang ketika di jual oleh bank telah menjadi hak nasabah sehingga tidak dapat dijual kembali oleh bank atau lembaga keuangan.
- l. Perjanjian *buy-back* di larang. Dengan demikian, komoditas yang telah dimiliki oleh nasabah tidak dapat menjadi objek transaksi *murabahah* antara nasabah tersebut dengan bank yang membiayai.
- m. *Promisory note* atau *bill of exchange* atas buku utang lainnya tidak padat di pindah tanggankan atau di transfer dengan suatu harga yang berbeda dari face value-nya.

4. Landasan Syari'ah dan Fatwa Tentang Murabahah

a. Al-Qur'an

Murabahah dibenarkan oleh Al-Qur'an As Sunnah dan

Ijma' dalam Al'Quran Allah SWT berfirman :



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. ; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁵

b. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Menetapkan : Fatwa tentang *Murabahah*

Ketentuan Umum *Murabahah* dalam lembaga keuangan syari'ah

²⁵ Junus Muhammad, *Terjemahan AL-Quran Karim*, (Bandung: PT Al:Ma'arif), h. 175.

- 1) Lembaga keuangan syari'ah dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang di perjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) LKS membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) LKS membeli barang yang butuhkan oleh nasabah atas nama LKS sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah diperlukan.
- 6) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 7) Jika LKS henda mewakili kepala nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga , akad jula beli murabahah harus di lakukan secara prinsip.

5. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

a. Penjual dan Pembeli

Pelaku cakup hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan mana yang baik mana yang tidak), sehingga jual beli dengan orang yang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil di katakan sah juga di izinkan oleh walinya.

b. Objek Jual Beli

- 1) Barang yang di jadikan jual beli adalah barang Halal.
- 2) Barang yang di jual belikan harus memiliki manfaatnya atau nilainya.
- 3) Barang tersebut di miliki oleh penjual.
- 4) Barang tersebut dapat diserahkan tergantung dengan kejadian tertentu dimasa depan.
- 5) Barang tersebut harus di ketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada kharar (kepastian).
- 6) Barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dengan jelas.
- 7) Adanya Harga yang di sepakati Yaitu besarnya barang atau harga yang di perjual belikan dimna harga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank (penjual) dan nasabah (pembeli).
- 8) Ijab Qabul yaitu Pernyataan atau ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak berlaku akad yang di lakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 9) Lingkung penggunaan.

Murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah. *Murabahah* sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan. *Murabahah* memungkinkan nasabah atau investor untuk memberi barang jadi, bahan baku, mesin-mesin atau peralatan dari pasar lokal dan pasar impor.²⁶

- 10) Potongan pelunasan dalam *Murabahah*.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Islam No. 23/DSN-

MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002.

- a. Jika nasabah dalam transaksi *Murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Lembaga Keuangan Islam boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.

²⁶ Wiroso, *Murabahah*, (Yogyakarta:Uii Press, 2005),h 167.

- b. Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syari'ah.²⁷

11) Uang Muka dalam *Murabahah*

Sesuai dengan Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/XI/2000 tanggal 16 september 2000:

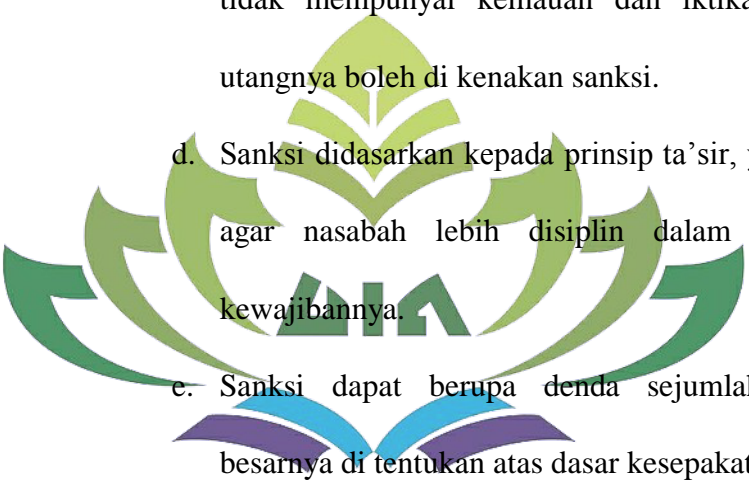
- a. Dalam akad pembiayaan *Murabahah* , Lembaga keuangan syari'ah dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.
- b. Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan .
- c. Jika nasabahnya membatalkan akad *Murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada Lembaga Keuangan Syari'ah dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, Lembaga Keuangan Syari'ah meminta tambahan terhadap nasabah.
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian. Lembaga Keuangan Syari'ah harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.²⁸

12.) Sanksi Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran

Sesuai Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000:

²⁷ Nurul Hudadan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010),h 46.

²⁸ *Ibid*,h 47.

- 
- a. Saksi yang disebut dalam fatwa ini adalah saksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syari'ah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayarang dengan sengaja.
 - b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar di sebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
 - c. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk utangnya boleh dikenakan sanksi.
 - d. Sanksi didasarkan kepada prinsip ta'sir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
 - e. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani.
 - f. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.²⁹

²⁹ *Ibid*, h 49.

6. Tujuan dan Manfaat *Murabahah*

a. Tujuan Pembiayaan

Membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu :

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.

Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan ke usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam factor kemampuan dan kemauan ini terdapat unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga

keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.³⁰

b. Manfaat *Murabahah*

Transaksi *bai al-murabahah* memiliki beberapa manfaat beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Bai al-murabahah* memiliki beberapa manfaat kepada bank syari'ah salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai al-murabahah* juga sangat sederhana dan juga memudahkan penanganan administrasinya dibank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah.³¹

7. **Prosedur Pembiayaan *Murabahah***

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan, yaitu :

- a. Berkas dan pencatatan.
- b. Data pokok dan analisis pendahuluan meliputi :
 - 1) Realisasi pembelian, produksi dan penjualan.
 - 2) Rencana Pembelian, produksi dan penjualan.
 - 3) Jaminan.
 - 4) Laporan Keuangan.
 - 5) Data kualitatif dan calon debitur.
 - 6) Penelitiann data.
 - 7) Penelitian atas realisasi usaha.
 - 8) Penelitian atas rencana usaha.
 - 9) Penelitian dan penelitian jaminan.
 - 10) Laporan keuangan dan penelitian.³²

³⁰ Rivai Veitzhal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Grafindo, 2012), h. 5.

³¹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alvabel, 2006), h. 67.

³² Vaeithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h.353-354.

C. Tinjauan Umum Tentang Bmt

1. Pengertian BMT

Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan mikro (LKMS) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah . BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu :

- a. *Baitul Tamwil* (Rumah Pengembang Harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi prngusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengotipmalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya³³

Baitul mal wal tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayl al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalammeningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Selain itu *baitul wal tamwil* juga menerima titpan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

2. Dasar Hukum BMT

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإَبْطِلَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تَجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

³³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2009),h 551.

Artinya :“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS:An-Nisa ayat 29).³⁴

Penjelasan ayat diatas, menerangkan tentang hukum dosa besar dan dosa kecil, demikian pula menerangkan agar manusia tidak menjatuhkan diri kelembah binasa.

Menurut peraturan yang ada dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Landasan hukum koperasi adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang di ganti dengan Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi.

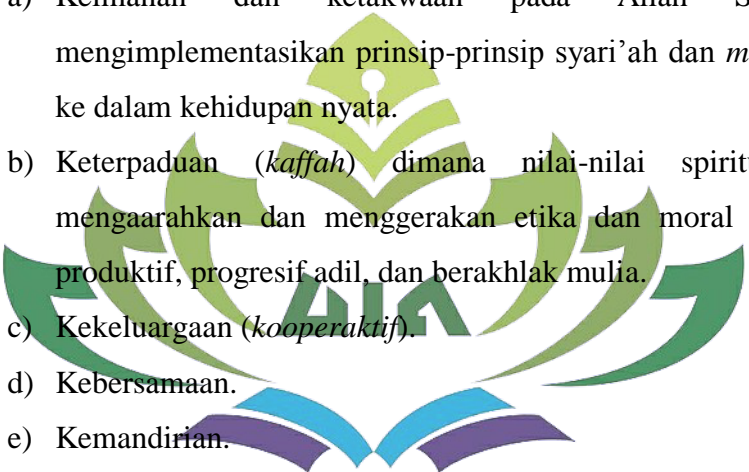
Baitul Wat Tamwil mengambil bentuk hukum koperasi adalah menurut prakarsa sendiri, yaitu karena desakan kebutuhan praktis yaitu untuk memperoleh payung hukum, dan bukan karena adanya dasar hukum yang menentukan atau mengharuskannya demikian, sebab dasar peraturannya tentang BMT memang belum ada.³⁵ Maka diperlukan kebijakan tepat bagi BMT demi kepastian hukum sebagai landasan peraturan hukum yang kokoh dan memperkuat kedudukan hukum serta jaminan perlindungan dalam pengembangan usahanya sebagai

³⁴ Junus Muhammad, *Terjemahan AL-Quran Karim*, (Bandung: PT Al:Ma'arif), h. 183.

³⁵ Muhtarom, Problem Yuridis Lembaga Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil dalam persektif sistem hukum lembaga keuangan di Indonesia. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Utama Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas sebelas maret Surakarta, 2004, h. 78.

kelompok kecil yang tumbuh dari bawah dengan pesat sebagai lembaga ekonomi rakyat, guna memberikan rasa aman kepada pihak yang terkait di dalamnya sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan terindikasi tumbuh dan berkembang BMT bisa lebih jauh lagi . jadi segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang terkait disebut perlindungan hukum.

3. Prinsip-prinsip BMT

- 
- a) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dan *muamalah* Islam ke dalam kehidupan nyata.
 - b) Keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, produktif, progresif adil, dan berakhlak mulia.
 - c) Kekeluargaan (*kooperaktif*).
 - d) Kebersamaan.
 - e) Kemandirian.
 - f) Profesional
 - g) Istikamah konsisten kontinuitas.berkelanjutan tanpa hentidan tanpa pernah putus asa . setelah mencapai sesuatu, maju ketahap berikutnya, dan hanya kepada Allah berharap.³⁶

4. Prinsip Operasional BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan 3 Prinsip :

- a) Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara permodalan (penyedian jasa) dengan

³⁶ *Ibid*, h 454.

pengelola dana. Pembagian hasil ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana (penyimpan dan penabung) adapun bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini :³⁷

1) *Al-Mudharabah*

Merupakan akad antara 2 belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan di bagi 2 sesuai dengan perjanjian.³⁸

2) *Al-Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama antara 2 belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama dengan kesepakatan.³⁹

3) *Al-Muzara'ah*

Merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dan hasil panen.

4) *Al-Musaqah*

Merupakan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.⁴⁰

b) Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pemberian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibeli nya ditambah *merk-up*, keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada pengelola dana.⁴¹

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h.137.

³⁸ Ibid, h. 138

³⁹ Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah dan Teori Keperaktekan*, (Jakarta: Media pres, 2013), h. 98.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.281.

1) *Al-Murabahah*

Merupakan jual beli suatu barang dengan pembayaran ditangguhkan. Maksudnya pembeli baru membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

2) *As-Salam*

Merupakan akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya.

3) *Bitsaman Ajil*

Merupakan jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok dan ditambah keuntungan yang disepakati.

4) Prinsip *Non-Profit*

Pembayaran yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.

5) *Al-Qordu Hasan*

Merupakan kegiatan transaksi dengan akad pinjaman non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjam tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan .

5. Akad dan Sumber Dana Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

a. Menghimpun dana

Penghimpunan dana oleh BMT diperoleh melalui simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah BMT untuk disalurkan disektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadiah. Simpanan murabahah jangka pendek atau jangka panjang.⁴²

Untuk menumbuhkan kembangkan usaha BMT, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman dan dana-dana yng bersifat

⁴² Hartanto Widodo, *Op Cit*, h.83.

hibah atau sumbangan atau sekedar titipan saja. Sumber dana BMT sebagai berikut :

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut adalah sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syari'ah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad *musyarakah*.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal BMT sebagai simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah. Anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya samapi seorang di nyatakan keluar dari keanggotaan BMT.

3) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk Investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dan kemudia menyimpannya di BMT.⁴³

b. Jasa-Jasa

Disamping produk kerjasama dan jual beli BMT juga dapat melakukan kegiatan jasa layanan antara lain :⁴⁴

1) Jasa *Al-Ijarah*

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upaya sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) Jasa *Wadi'ah* (titipan)

Merupakan sesuatu yang ditempatkan ukan pada pemiliknya supaya dijaganya.

⁴³ Ibid, h.84-85.

⁴⁴ Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muslimah, Ibadah Muamalah*, (Jakarta: Pusat Amani, 2007), h.367.

3) *Hawalah* (Anjak Piutang)

Merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4) *Rahn*

Merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dalam produk gadai ini BMT tidak mengenakan bunga melainkan mengenakan tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadainya tersebut. Dalam produk gadai ini BMT tidak mengenakan harga bunga melainkan mengenakan tarif sewa penyimpanan dari barang yang digadainya tersebut.

5) *Wakalah*

Merupakan penyerahan harta seseorang kepada orang lain untuk menjaga di masa hidupnya.

6) *Kafalah*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung BMT kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban anggotanya atau yang ditanggungkan atau seputar pengalihan tanggungjawab.

7) *Qordh* (Pinjaman Lunak)

Jasa ini merupakan pinjaman lunak, dimana pinjaman yang diberikan harus dikembalikan sejumlah dana yang diterima tanpa adanya tambahan. Kecuali si anggota mengembalikan

lebih tanpa persyaratan di muka maka kelebihan dana tersebut diperoleh diterima oleh BMT dan dimasukkan kedalam kelompok dana Qardh. Umumnya sumber dana ini diambil dari simpanan pokok.⁴⁵

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah para sistem operasional BMT, Pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan Islam adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003).⁴⁶

- a) Giro wadiah
Produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititip di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan dan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besar bonusnya tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijakan BMT. Sungguh demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- b) Tabungan *mudharabah*
Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah Islam bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).
- c) Deposto *mudharabah*
BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan Islam dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (*nudharabah muthlaqah*). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga *shahibul maal*. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan

⁴⁵ Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah*, (Sidoarjo: Marsan, 2009), h.38.

⁴⁶ Nurul Huda dkk, *Op.Cit.* h. 366.

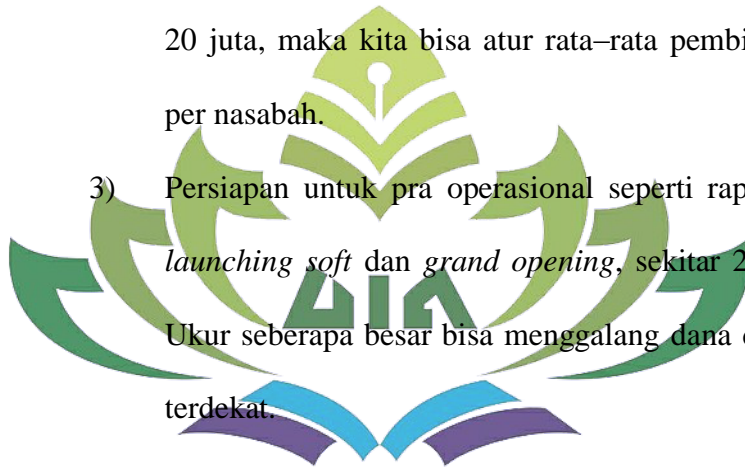
pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut *mudharabah muqayadah*.

6. Prosedur BMT

Prosedur Perijinannya berdasarkan aturan dari Departemen Koperasi di wilayah di mana BMT akan didirikan. Prosedur yang biasanya dilakukan oleh para pemrakarsa pendiri BMT dapat saya paparkan sebagai berikut:

- a) Persiapan Tim Perumus Pendirian BMT dilakukan pelatihan pemahaman tentang BMT kepada peminat di sekitar wilayah / kawasan potensial. Lakukan identifikasi potensi SDM, yang nanti akan menduduki / berperan sebagai pemodal, pengelola, pengurus, dewan manajemen dan dewan syari'ah. Lakukan identifikasi potensial pengurus dan pengelola calon BMT secara spesifik sesuai dengan diskripsi pekerjaan yang akan ditekuni.
- b) *Survey* Kelayakan Koperasi. Pilih lokasi yang strategis (dekat calon nasabah penyimpan, transportasi mudah, ada tempat parkir, area mobilitas usaha tinggi, set up ruangan yang okey, sesuaikan dengan kemampuan modal yang ada). Identifikasi wilayah seberapa besar para tokoh dan masyarakat di lingkungan sekitarnya mendukung.
- c) *Survey* Kelayakan Usaha. Ukur seberapa besar modal yang mungkin terkumpul semakin besar modalnya semakin baik, karena modal akan digunakan untuk :

- 1) persiapan di awal pendirian seperti sewa gedung, persiapan ATK (slip, arsip, buku pendukung, stempel, polpen, kartu ID, dll). meja dan kursi karyawan, lemari penyimpanan data, satu set computer, dan asesoris lainnya. Nilainya sekitar 7 sampai 15 juta.
- 2) Pembiayaan kepada nasabah dengan harapan memperoleh pendapatan dari usaha ini dan tambahan simpanan pihak ke III. Kalau modal yang disiapkan untuk pembiayaan sejumlah 20 juta, maka kita bisa atur rata-rata pembiayaan 200 ribu per nasabah.
- 3) Persiapan untuk pra operasional seperti rapat, konsolidasi, *launching soft* dan *grand opening*, sekitar 2 sampai 5 juta. Ukur seberapa besar bisa menggalang dana dari masyarakat terdekat.
- 4) Persiapan SDM, Keuangan dan Badan Hukum Koperasi *Rekrutmen* pendiri BMT minimal 20 orang yang potensial (baik sebagai pengurus 3 orang, pengelola (+- 5 orang) maupun pemodal dan anggota). Buat rumusan badan hukum Koperasi Syari'ah konsultasi dengan Departemen Koperasi setempat. Persiapkan modal disetor atas nama : Kantor wilayah Koperasi Tingkat Provinsi senilai 16 juta untuk simpan pijamam, dan 8 juta untuk koperasi serba usaha. Buat berita acara pada saat RAT dan rumusan perencanaan



laporan keuangan berupa neraca nol tahun dan proyeksi 1 tahun kedepan buat proyeksi neraca keuangan dalam bentuk *cash flow* dan rugi labanya. Sesuai dengan data-data dan asumsi yang mendekati kebenaran, Lihat contoh seperti dalam lampiran 1

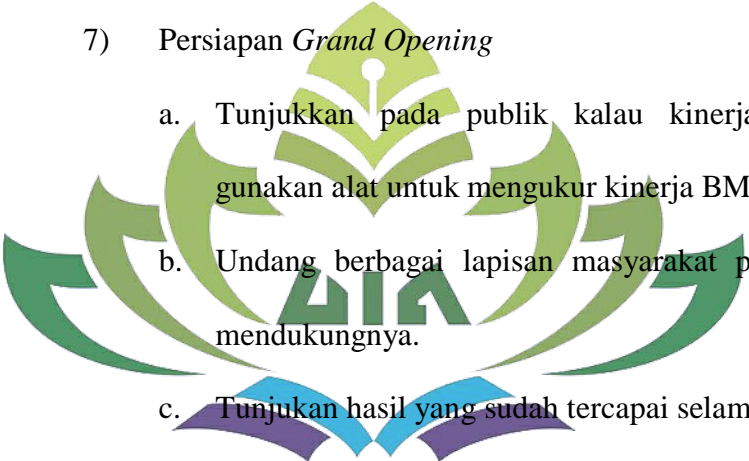
5) Persiapan Pra Operasional.

Persiapkan SOB (standar operasional Baku) BMT sebagai acuan kerja BMT, berisi tentang: 1) Visi misi BMT. 2) Sistem dan prosedur pengelolaan BMT. 3) Strategi pengembangan BMT dan target-targetnya. 4) Pengelolaan SDM termasuk gaji dan prestasi. 5) Sistem keuangan dan akuntansinya. Sambil menunggu badan hukum, lakukan pra operasional dan konsolidasi kepada masyarakat sekitarnya. Persiapkan pengumpulan dana dari pemodal minimal 25 juta s/d 50 juta sebelum operasional. Lakukan pelatihan internal dan sekaligus penguatan di bagian marketing untuk tujuan meningkatkan simpanan dan pembiayaan. Lakukan pengamanan anggaran dengan cara membuat perencanaan neraca yang mengindikasikan terjadinya produktifitas yang tinggi menuju efisiensi yang progresif (sesuai dengan target dan program serta pemasukan).

6) Persiapan *Soft Opening*

Lakukan tirakatan, tausiah, doa bersama, pengajian kalau BMT akan segera dibuka secara *soft opening*. Lakukan pekerjaan dengan senang hati dan jangan mendua, layani nasabah dengan sebaik-baiknya, jaga kredibilitas BMT secara terus menerus, kerja keras dan istiqmah. Lakukan terobosan dengan cerdas dengan memperhitungkan untung ruginya kalau program kerja dijalankan.

7) Persiapan *Grand Opening*

- 
- a. Tunjukkan pada publik kalau kinerja BMT baik, gunakan alat untuk mengukur kinerja BMT.
 - b. Undang berbagai lapisan masyarakat potensial untuk mendukungnya.
 - c. Tunjukkan hasil yang sudah tercapai selama ini.
 - d. Lakukan persiapan RAT internal untuk memperbaiki kinerja keuangan dan manajemen.

8) Penguat Pemasaran

Lakukan penguatan TIM marketing untuk melakukan terobosan terobosan. Lakukan penguatan TIM internal untuk mendukungnya seperti software dan lainnya.

9) Peningkatan Kualitas SDM

Berikan peluang–peluang untuk meningkatkan prestasi bagi karyawan dengan cara mengirim karyawan dalam pelatihan

dan seminar. Bentuk TIM solit jangan sampai ada yang ragu dan keluar dari formatur. (lihat gajinya, hasil kerjanya atau prestasinya) Tunjukkan jenjang karir.⁴⁷

7. Penerapan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah dibentuk untuk mengawasi operasional bank dan lembaga keuangan untuk mengawasi produk-produknya agar sesuai dan tidak menyimpang dari garis syariahnya. Adapun yang menjadi sistem operasional perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya yang menjadi tugas dari Dewan Pengawas Syariah dan prinsip dasar dari produk-produk syariah adalah⁴⁸:

a. Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah Produk-produk yang ada di Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- 1) Produk penghimpun dana (*funding*)
- 2) Produk penyaluran dana (*financing*)
- 3) Produk jasa (*Service*)

b. Produk Penghimpun Dana Produk yang termasuk dalam golongan ini adalah:

- 1) Modal (*Onwer*)
- 2) Titipan (*Wadi'ah*)
- 3) Investasi (*Mudharabah*)

⁴⁷ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 200.

⁴⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.156

c. Tabungan (*Wadi'ah Dan Mudharabah*)

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.

d. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Menurut Sifat pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, dagang, maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Menurut keperluan pembiayaan produktif yaitu Pembiayaan modal kerja dan Pembiayaan investasi.

e. Produk yang termasuk dalam golongan ini adalah:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menjadi (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain (mudharib) sebagai pengelola. Keuntungan usah di bagi sesuai kesepakatan dalam

kontrak sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tidak terjadi akibat kelalaian mudharib.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian ⁴⁹.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20% ⁵⁰.

⁴⁹ Husaini Mansur, *Dimensi Perbankan dalam Al-Quran*. (Jakarta Selatan: PT. Visi Cita Kreasi, 2007), h.100.

⁵⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011) h. 113.

8. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Anggota

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hayyi⁵¹ dan Dani El Qodri⁵². Menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah masih kurang efektif dimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah hanyalah sebatas memeriksa berkas-berkas kelengkapan akad dan belum mengecek tingkat validitas berkas tersebut dengan mengkonfirmasi secara langsung kepada Anggota.

Belum efektifnya mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu mata rantai penyebab terjadinya fraud di lembaga keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam mengawasi dan meminimalisir perilaku *tadlis* dan fraud dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lahirnya lembaga keuangan yang adil, jujur dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lemahnya kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan berdampak pada risiko pelanggaran kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah yang dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang akan berujung pada risiko penarikan dana (*rush*), risiko likuiditas dan lainnya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan salah satu alasan nasabah memilih perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

⁵¹ Abdul hayyi, "Efektivitas Pengawasan Bank Syariah; Studi terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah Kota Mataram," Thesis: UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2011, h. 135.

⁵² Dani El Qori, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah: Studi pada BPD DIY Syariah," Thesis: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2012, h. 111.

dilakukan oleh Naser⁵³. Yang melakukan penelitian terhadap 260 nasabah bank syariah di Yordania yang menyimpulkan bahwa 70% faktor utama nasabah memilih Bank Syariah karena ketaatan terhadap agamanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Chapra dan Ahmed juga menyebutkan bahwa kegagalan penerapan prinsip syariah akan menyebabkan nasabah pindah ke bank lain sebesar 85% berdasarkan hasil penelitiannya atas 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah dalam survei tata kelola (GCG) (berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan). Para responden menyatakan akan memindahkan dananya ke bank syariah lain jika ditengarai terjadi pelanggaran syariah dalam operasional Bank Syariah.⁵⁴

Hasil penelitian Bank Indonesia di Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa dari 160 responden, 72,5% nya mengatakan bahwa alasan responden memilih Bank Syariah adalah karena kesesuaian dengan syariah agama dan 58,8% motivasi responden memanfaatkan produk penghimpunan dana bank syariah karena menjalankan syariah agama.⁵⁵

Hasil penelitian Bank Indonesia tersebut dapat menjadi indikator bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah masih menjadi salah satu alasan nasabah untuk memilih perbankan syariah.

⁵³ Nasser, K, Jamal A. and Khatib K, "Islamic Banking: a Study of Costumer Satisfaction and Preferences in Jordan," International Journal of Banking Marketing, Vol.17, No.3, 1999, pp.135-150.

⁵⁴ Chapra, M.U. and Ahmed, H., "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions," Occasional Paper No.6, (Jeddah: Islamic Research & Training Institute/ Islamic Development Bank, 2002), pp 58-67.

⁵⁵ Bank Indonesia dan Institute Pertanian Bogor, "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan", 2004, h. 7

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Objek Penelitian

1. BTM BiMU Bandar Lampung

BTM BiMU merupakan Amal Usaha Muhammadiyah yang mandiri dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PMW) Provinsi Lampung pada tahun 2004 dengan nama Koperasi Syari'ah BTM Bandar Lampung, namun sesuai dengan peraturan Kementrian Koperasi , pada RAT TB 2015 berubah menjadi KSPPS BTM BiMU yaitu Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama.¹

Baitut Tamwil memiliki arti yang diambil dari dua suku kata yaitu bait yang berarti bangunan atau rumah dan At-Tamwil yang berarti pengembangan harta, jadi Baitut Tamwil adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan menabung.

Sebagai amal usaha, BTM tumbuh dan berkembang di bawah binaan PWM Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Lampung. Pada mulainya BTM mendapat pinjaman dana dari

¹ Dokumentasi, BTMBiMU

Majelis Ekonomi Muhammadiyah Wilayah Lampung sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan dana itu lah BTM menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan khususnya pembiayaan usaha yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah (bagi hasil).

Hal ini ditandai dengan mulainya kegiatan pembiayaan pada pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar tradisional way Halim Bandar Lampung. Keberadaan BTM diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan keuangan Muhammadiyah dan ujung tombak dakwah bil hal Muhammadiyah Lampung.

2. Visi dan Misi BTM BiMU

a. Visi BiMU adalah “ Menjadi Koperasi Syariah Pilihan Utama Masyarakat dalam Mendukung Gerakan Dakwah Ekonomi Muhammadiyah

b. Misi BTM BiMU :

- 1) Mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan sistem ekonomi Islam .
- 2) Menyajikan Produk-Produk transaksi syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan anggota.
- 3) Memberikan pelayanan terbaik. Transparan dan akunbel kepada masyarakat.

- 4) Melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang lembaga keuangan syariah, mampu berkompetisi dan berakhlak karimah.
 - 5) Mengembangkan kerjasama dengan baik dengan seluruh pengangku kepentingan (stakeholder) dalam meningkatkan perekonomian umat.
- c. Motto BTM BiMU adalah “Melayani Sepenuh Hati mengapai ridho illahi”.
- d. Badan Hukum : No. 024/BH/DKPKPM/X/2005
 - e. Akta Pendirian : No. 11 Tanggal 09 Agustus 2005
(Notaris Budi Kristiyanto , S.H.)
 - f. Akta Perubahan: No. 78 Tanggal 16 Desember 2010
(Notaris Budi Kristiyanto , S.H.)
 - g. Akta Perubahan : No. 02 Tanggal 01 Juni 2011
(Notaris Budi Kristiyanto , S.H.)
 - h. Akta Perubahan : No. 21 Tanggal 26 Oktober 2016
(Notaris TB. Lukman Suheru, SH)
 - SIUP : No. 1082/510/5/PK/XI/2007
 - SITU : No. 1458/II/E/TKP/2007
 - TDP : No. 070126500313
 - NPWP : No. 02.707.215.6-322.000

3. Struktur Organisasi BTM BiMU

Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. BMT juga memiliki struktur kepengurusan yang menjadi penggerak dalam menjalankan komponen yang ada pada BMT. Struktur yang tersusun merupakan gambaran dari adanya sebuah program kerja yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut, oleh karenanya kepengurusan haruslah memiliki personalia yang mewakili

dari berbagai aspek dan keahlian yang dibutuhkan oleh suatu organisasi.

Adapun susunan kepengurusan yang ada di BMT sebagai berikut :

a. Dewan Pengawas Syari'ah :Drs. Syamsul Hilal, M.Ag, dan Dr. Nurvaif S. Chaniago

b. Pengawas

1) Ketua: H. Fachruddin Al. Anidi, SH.

Memberikan Fatwa, penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan yang di anggap perlu dalam hal ketepatan pola, akad, dan transaksi-transaksi lainnya di Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dengan Syari'ah Islam sebagai dasar pedoman operasional Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

2) Anggota :Drs H. Habiburahman, M.M.

:Dr H. Sudarman,M.A.

Menjalankan dalam memberikan penjelasan, informasi dan pandangan-pandangan dan transaksi-transaksi yang terjadi pada Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

c. Pengurus

1) Ketua: Ir. H. Jamhari Hadipurnawan.

Adapun alasan utama dari ketua. Melakukan control atau pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas lembaga dalam

rangka menjaga kekayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampungdan memberikan arahan dalam upaya lebihmengembangkan dan meningkatkan kualitas Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

2) Wakil ketua : Elly kasim, S.E.,Akt.

: Yuke Derly,S.P

Bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam hal pengawasan dan pengembangan kemajuan Baitut Tamwil Muhammadiyah.

3) Sekretaris : Ahsanal Huda, S.P

Melakukan pengelola administrasi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas Badan Pengurus.

Bendahara : Hj. Martini Sutyowati, S.E.

Melakukan pengelolaan keuangan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung secara keseluruhan diluar unit-unit yang ada. ²

4. Produk Pembiayaan BTM BiMU

a. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BTM untuk nasabah untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Selanjutnya dalam pembiayaan ini Nasabah dan BTM setuju untuk berbagi hasil atas

²Arsip. Kspps BTM BiMU Bandar Lampung

pendapatan usaha tersebut. Risiko kerugian ditanggung oleh pihak BTM kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola atau nasabah, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri perusahaan, industri perumahan, pertanian dan lain-lain berupa usaha modal kerja dan investasi.

b. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, di mana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan hisbah yang disepakati. Adapun Manfaat dari pembiayaan untuk usaha ini yaitu :

- 1) Lebih menguntungkan karena berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha.

Fasilitas yang di dapat :

- a) Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus di akhir priode).
- b) Bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.

c. *Murabahah*

Murabahah merupakan fasilitas penyaluran dengan sistem jual beli. BTM BiMU Bandar Lampung akan membelikan barang-

baranghalal apa saja yang nasabah butuhkan kemudian menjual kepada nasabah untuk diangsur sesuai dengan nasabah. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi (misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dan lain lain).

d. *Ijarah*

Ijarah merupakan fasilitas pembelian berupa sewa barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran. Fasilitas pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk sewa tempat usaha, sewa kendaraan, pendidikan, dan lainnya.

e. *Hawalah*

Hawalah merupakan transaksi pengalihan utang-piutang . Membantusupplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. BTM mendapat pengantian biaya yang timbul atas jasa pemindahan piutang.

f. *Produk Jasa*

Bill Payment atau *Payment Point Online Bank* (PPOB) adalah loket jasa pembayaran tagihan online yang tersebar di seluruh jaringan BMT Lampung, sehingga memudahkan anggota dalam membayar tagihan-tagihan rutin bulanan : Tagihan PLN,

Telkom, TV Kabel, BPJS, pembelian pulsa handphone hingga tiket pesawat.

5. Wawancara BMT BiMU Bandar Lampung

Dari hasil wawancara tentang peranan Dewan Pengawas Syari'ah

a. Wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah BTM BiMU Bandar Lampung.

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah yaitu Drs. Syamsul Hilal, M. Ag bahwa dengan mengawasi usaha BTM BiMU terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan akad-akad yang di keluarkan oleh Bank Indonesia. Dengan Fatwa DSN-MUI sampai saat ini terkait dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat BTM BiMU misalnya Standar Operasional Prosedur (SOP) *murabahah*. *Murabahah* termasuk produk yang paling laku karena membiayai pedagang-pedagang kecil. Dewan pengawas syari'ah menilai aspek syari'ah apabila suatu produk dari BTM BiMU dinilai memenuhi prinsip-prinsip syari'ah apabila produk-produk tersebut sudah memenuhi standar dari akad tersebut yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau sudah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang telah dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI. Dewan Pengawas Syar'ah yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank dan lembaga keuangan syari'ah bahwa kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah. Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan dan lembaga keuangan

syari'ah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian bank dan lembaga keuangan syari'ah agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam yang harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ditempatkan pada Lembaga Keuangan Syari'ah.

b. Wawancara Dengan Karyawan BTM BiMU Bandar Lampung

Berdasarkan wawancara dengan kabag Legal yaitu Bapak Rahmat Habibi, pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan yang banyak di minati oleh anggota. Karena sangat membantu dalam mengembangkan usaha dan syarat pembiayaan yang lebih ekonomis sehingga mempermudah anggota dalam pengambilan pembiayaan . Pembiayaan yang dilakukan pihak BMT BiMU Bandar Lampung memiliki prinsip dasar yaitu *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (harta), *collateral* (jaminan), dan *condition* (kondisi). Dan peranan dari DPS itu sendiri untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI.

Prinsip “5 C” yaitu *Character*(karakter) bertujuan untuk menggambarkan menyangkut sifat debitur yang harus mempunyai iktikad baik dan komitmen yang tinggi untuk mengembalikan seluruh kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah di tandatangani bersama antara pihak debitur dan pihak BTM BiMU Bandar Lampung. Seperti usia, status, pergaulan, lingkungan, hobi, kebiasaan

sehari-hari dan Tanggungjawab terhadap kewajiban kepada pihak BTM BiMU Bandar Lampung Karena tidak diragukan lagi dan tidak bercacat. Sebagai sifat calon debitur.

Capacity (kemampuan membayar) Analisis kemampuan membayar dilihat dari pekerjaan penghasilan yang dimiliki pihak debitur sehingga dapat menghasilkan laba dan dapat membayar seluruh kewajiban di masa sekarang dan mendatang. Seorang analisis pembiayaan harus bisa memastikan bahwa pemohon memiliki sumber penghasilan yang memadai sehingga bisa memenuhi kewajibannya sebagai debitur.

Capital (harta) merupakan Analisis kemampuan anggota terhadap usahanya sendiri. Jika calon anggota sendiri tidak yakin akan usahanya, maka orang lain akan tidak yakin dan dapat dilihat juga apakah seseorang tersebut memiliki simpanan di BTM BiMU termasuk simpanan di lembaga keuangan lain. Dan apakah memiliki penghasilan tetap untuk angsuran pembiayaan yang di ambil di BTM BiMU Bandar Lampung. Dan peranan dari DPS itu sendiri untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI.

Collateral (jaminan) Penilaian jaminan dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kemudahan diperjualbelikan objek jaminan (marekteble), semakin mudah asset tersebut di

perjualbelikan, tingkat resiko BTM BiMU Bandar Lampung semakin kurang. Dan besarnya nilai jaminan mengcover seluruh jaminan. Jaminan hanya berfungsi dan bersifat sebagai solusi terakhir (*second wayout*) apabila debitur bermasalah tidak dapat mengembalikan kewajiban pinjaman.

Condition (kondisi) merupakan Analisis terhadap “kondisi” meliputi terhadap ekonomi (makro dan mikro) baik nasional, regional, maupun internasional, politik, perundang-undangan dan lain-lain. Namun dapat dilihat dari gejalanya dan mempunyai dominan terhadap keberhasilan kegiatan usahanya informasi yang perlu pihak BTM BiMU salah satunya yaitu Lokasi tempat barang, barang yang di jual dan jumlah pesaing yang jarak dan usaha dari BTM BiMU

c. Wawancara Dengan Para Anggota Pembiayaan *Murabahah*

Secara umum berdasarkan wawancara dengan anggota pembiayaan *murabahah* mengatakan bahwa, pembiayaan *murabahah* yang di berikan oleh pihak BTM BiMU. Pembiayaan *murabahah* yang merupakan penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban mengungkapkan kepada pembeli mengenai harga pokok dari barang dan keuntungan yang dimasukan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh. Barang yang di perjual belikan haruslah barang-barang dan bukan berupa dokumen-

dokumen kredit. Pada produk murabahah produk yang ditawarkan juga beranekaragaman dengan kualitas yang harus sesuai keinginan kita dan yang pasti BTM menawarkan atau memberikan pembiayaan untuk produk yang halal, kalau untuk jamin-jaminan produk, BTM memberikan ganti bila produk tersebut rusak yang bukan disebabkan oleh kita sendiri (anggota).

Menurut Bapak Sutrisno yang merupakan anggota BTM yang mengambil pembiayaan *Murabahah*, mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh BTM BiMU sangat membantu karena BTM tidak menyulitkan dalam pembiayaan dan pengajuan pembiayaan. Dan BTM BiMU memiliki prosedur yang lebih cepat kalau pembiayaannya uang, bisa dengan waktu yang sangat singkat karena sebelum melakukan pembiayaannya di survei dari pihak BTM BiMU ke tempat tinggal yang bersangkutan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Seperti, KTP, KK, dan Persyaratan lainnya yang sudah termasuk ketentuan oleh pihak BTM BiMU Bandar Lampung.

- 1) Berdasarkan penulis peroleh dari data lapangan dan wawancara dengan Ibu Sri Rejeki selaku kepala cabang BTM BiMU Bandar Lampung mengenai maksimal pinjaman pada bulan Januari 2018 sebesar Rp 70.000.000 atas nama anggota Yuyun Nailupar Alrasyid. Melakukan pinjaman pada BMT BiMU Bandar Lampung. Yang

cicil anpinjama nnya dengan tempo waktu yang telah disepakati pihak BMT BiMU dan pihak peminjam.

Yuyun Nailupar merupakan anggota lama daritahun 2010 yang memiliki simpanan sebesarRp 25.000.000 di BMT BiMU Bandar Lampung. Beliau juga memang sudah sering melakukan pinjaman di BMT BiMU Bandar Lampung. Dan dinilai sebagai anggota yang selalu melakukan pembayaran atau cicilan tepat waktu. Dengan pinjamanRp 70.000.000 Beliau menjaminkan sertifikat rumah. Yuyun melakukan pinjaman untuk modal usaha konveksi. Karena mitra usaha konveksi tersebut bisa dibilang tergolong baik. Sehingga banyaknya sekolah-sekolah di Bandar Lampung yang memesan di konveksi tersebut. Dan usaha konveksi yang dimilikinya mengalami kekurangan modal usaha. Dan akhirnya meminjam modal usaha Rp 70.000.000 di BTM BiMU Bandar Lampung.³

B. Objek Penelitian

a. Profil BMT Fajar BandarLampung

BMT Fajar dirintis sejak 1996 oleh beberapa orang yang semula tergabung pada Yayasan Bina Sejahtera. Alasan yang mendasari munculnya kesadaran di kalangan pengurus Yayasan akan dua kenyataan pokok yakni: Pertama, dalam kiprahnya

³Wawancara Sri rejekiketuacabang BTM BiMU Bandar Lampung (5 november 2018)

mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah kebawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek Renternir. Karena itu dipandang perlu adanya lembaga keuangan (syariah) sebagai alternatif solusi tersebut.

Lembaga alternatif tersebut diperlukandalam jumlah yang cukup, untuk menjawab dua hal sekaligus, yaitu BMT Fajar dapat berkembang sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil atau mikro dan BMT Fajar dapat dijadikan sebagai laboratorium atau model bagi masyarakat yang ingin mendirikan BMT.

Setelah mengalami masa embrional sejak Tahun 1996, pada tanggal 16 Mei 1997 BMT Fajar resmi didirikan oleh 31 orang. Dengan simpanan pokok sebesar Rp50.000,00 per orang, sehingga modal terkumpul baru sebesar Rp1.550.000,00. Sejak itulah anggota pendiri sepakat menjadikan BMT Fajar Metro berbadan Hukum Koperasi.

- a) Nama KSPPS : KSPPS BMT FAJAR
- b) Nomor Badan Hukum : 61/BH/KWK.7/XII/1997
- c) Tanggal Badan Hukum : 15 Desember 1997
- d) PAD Terakhir : 904/III.11/Klb.1/IX/2015 (Tanggal 23 September 2015).
- e) Pengawas: Ketua : H. Samijo Jarot, M.BA.
Anggota : H. Mahfudz, S.Ag., M.H
Anggota : H. Budi Pranoto, M.Pd.I

5) Karyawan KSPPS BMT Fajar

1) Kepala Cabang

Posisi dalam organisasi dibawah ketua, membawahi langsung seluruh staff kantor cabang yang dipimpin.

2) Arsip Standar Operasional Prosedur KSPPS BMT Fajar

- a) Pengawas Pengurus.
- b) Sekretaris Bendahara Ketua.
- c) Kantor cabang jaringan SDI Pajak Keuangan Marketing Keanggotaan Adm umum personalia.
- d) Bagian Marketing dan Bagian Operasional
- e) *CS Teller Accounting Funding.*
- f) Officer
- g) Account
- h) Adm Pembiayaan

3) Fungsi Utama

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktifitas lembaga yang meliputi dana dari pihak ketiga seta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas utama tersebut dalam upaya mencapai target. Tanggung Jawab dan tugas pokok.

- a) Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, dan serta proyeksi (finansial maupun non finansial).
- b) Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
- c) Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan.
- d) Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua.

- e) Pekerja yang berorientasi pada pencapaian target.
- f) Terjalannya kerjasama dengan pihak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan lembaga.
- g) Terjaganya keamanan dana-dana masyarakat yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset KSPPS BMT Fajar.
- h) Wewenang
 - (1) Memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan.
 - (2) Menyetujui/menolak secara tertulis pengajuan rapat komite secara musyawarah dengan alasan yang jelas.
 - (3) Menyetujui/menolak pencairan droping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang.
 - (4) Menyetujui pengeluaran uang untuk pembelian aktiva tetap sesuai dengan batas wewenang.
 - (5) Menyetujui pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang.
 - (6) Menyetujui/menolak penggunaan keuangan yang diajukan tidak melalui prosedur.
 - (7) Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan.
 - (8) Melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (9) Mengusulkan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga.

3. KSPPS BMT Fajar.

a. Fungsi Utama

Merencanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi, melaporkan serta melakukan penelitian dan pengembangan terhadap produk, kegiatan, strategi, pengorganisasian dan segala bentuk operasional lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga.

b. Tanggung Jawab

Membuat laporan evaluasi tentang produk, kegiatan, strategi, pengorganisasian dan segala bentuk operasional lembaga.

1) Kualitas lembaga BMT Fajar.

Membuat rencana pengembangan jaringan BMT Fajar.

a) Wewenang

Mengusulkan rencana dan solusi Peningkatkan kualitas BMT Fajar Bandar Lampung. Meminta kelengkapan laporan administrasi lembaga guna keperluan penelitian dan pengembangan lembaga. Dan Mengusulkan pembuatan kantor baru dan kerjasama pihak ketiga.

2) Kepala Divisi Keuangan

Posisi dalam organisasi dibawah Bendahara, bertanggung jawab langsung atas mengelola administrasi keuangan dan pelaporan keuangan KSPPS BMT Fajar.

a) Fungsi utama

Mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan.

b) Tanggung jawab

Pembuatan laporan keuangan. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan. Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.

c) Wewenang

- (1) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan/ transaksi.
- (2) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggung jawaban keuangan.
- (3) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan kepala cabang untuk keperluan publikasi.

4. Produk-produk Layanan BMT Fajar Bandar Lampung

Adapun produk-produk layanan yang digunakan oleh BMT Fajar kepada nasabah adalah sebagai berikut:

- 1) Produk
- 2) Simpanan (Produk penghimpunan Dana/ *funding*)
 - a) Simpanan *Wadiah* merupakan simpanan yang dinilai sebagai titipan dan tidak berbagai hasil atau merupakan simpanan pembiayaan.
 - b) Simpanan *Mudharabah* berjangka merupakan produk simpanan berjangka ini ditunjukan kepada masyarakat muslim yang ingin mengidentifikasikan dananya untuk kemajuan prekonomian ummat melalui sistem bagi hasil yang dikelola sesuai syari'ah.

- c) Simpanan Fajar Gold merupakan produk simpanan masa depan yang bertujuan untuk menyiapkan kebutuhan anggota jangka panjang, seperti merencanakan pendidikan sang buah hati atau menyiapkan hari tua.
- d) Qurban merupakan simpanan yang membantu dalam merencanakan ibadah qurban anggota.

2) Pembiayaan (Penyaluran Dana/*Financing*)

- a) *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara BMT Fajar dengan anggota. Dimana BMT Fajar sebagai pemodal dan anggota sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Prosantase pembagian keuntungan disebut nisbah.
- b) *Musyarakah* merupakan bentuk kerjasama perniagaan antara pemilik modal, untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha (BMT dengan anggota), dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut prporosi penyertaan modal dan kesepakatan bersama.
- c) *Murabahah* merupakan pembiayaan berupa jasa atau sewa, dimana harga serta angsurannya disepakati di awal.
- d) *Istisna'* merupakan jual barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kreteria tertentu, sedangkan pola pembiayaan dapat dilakukan sesuai

kesepakatan (dapat dilakukan didepan atau pada saat pengiriman).

- e) *Ijarah* merupakan pembiayaan berupa jasa ata sewa, dimana harga serta angsurannya disepakati di awal.

3) Program Baitul Maal

- a) *Ziswaf*
- b) Pembiayaan Pemberdayaan Umat

4) Prinsip-prinsip Pelayanan pada BMT Fajar Bandar Lampung.

Adapun prinsip-prinsip pelayanan pada BMT Fajar menerapkan bahwa seluruh karyawan BMT Fajar dalam melakukan dan memberikan pelayanan kepada seluruh anggota didasari oleh prinsip 6. S yaitu :

- a) *Salam*

Yaitu ucapan Assalamu'alaikum, Wassalamu'alaikum.

Warahmatullahi Wabarakattuh merupakan ucapan atau jawaban yang harus senantiasa diberikan oleh setiap anggota, sesama karyawan atau siapapun yang berinteraksi dengan kita, kecuali bila kita telah tahu bahwa yang bersangkutan bukan lah orang muslim/muslimah. Ucpan tersebut merupakan ciri dan bagian dari kepribadian khas karyawan BMT Fajar, oleh karena itu ucapan tersebut harus dilakukan dengan tulus dan benar-benar menjiawi dalam prilakunya. Bukan hanya sekedar

ucapan formalitas belaka, sehingga mampu tercipta suasana Islamis, sejuk, penuh persaudaraan dan penuh silaturahmi.

b) *Simple*

Yaitu pelayanan yang diberikan dengan bahasa dan prosedur yang sederhana dan mudah serta jangan sampai memberi kesan mempersulit anggota.

c) *Soon*

Yaitu pelayanan yang diberikan dengan sigap, cekatan, cepat dan sesegera mungkin tanpa prinsip ke hati-hatian dan keamanan.

d) *Solution*

Yaitu dalam memberikan pelayanan hendaknya senantiasa dapat memberikan jalan keluar alternatif dan hindari kata-kata tidak ada, tidak boleh, tidak bisa, tidak mungkin, dan gantilah kata-kata tersebut dengan bagaimana kalau.

e) *See*

Yaitu dalam melakukan pelayanan hendaknya melihat dan memberikan perhatian dengan sebaik-baiknya kepada yang dilayani, jangan sampai bersikap acuh-tak acuh dan menyepelekan.

f) *Smile*

Yaitu dengan memberikan senyuman yang sopan, ramah dan tulus dalam memberikan layanan.

5. Wawancara BMT Fajar Bandar Lampung.

a) Wawancara dengan Dewan Pengawas BTM BiMU Bandar Lampung.

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Pengawas Syari'ah yaitu H. Samijo Jarot, M.BA. bahwa dengan adanya Dewan Pengawas Syari'ah hanya memberi pengawasan penerapan syari'ah dan mengawasi bagaimana akad-akad dan praktek pemenuhan unsur-unsur syari'ah sesuai yang telah dikeluarkan Fatwa DSN-MUI. Salah satunya akad yang termasuk banyak di minati oleh masyarakat yaitu akad murabahah karena produk murabahah termasuk produk yang paling laku karena membiayai pedagang-pedagang kecil. Hanya saja DPS di ibaratkan hanya sebagai wasit dalam pengawasan produk yang pengawasan DPS selama 1 tahun sekali atau biasa disebut dengan rapat anggota tahunan. Dalam hal pengawasan DPS memang memiliki hak penuh dalam pengawasan akad akan tetapi DPS tidak hanya berkerja sendiri tetapi DPS juga di bantu dengan satuan pengawas internal untuk mengecek secara detail dokumen-dokumen yang di butuhkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Upaya

untuk meningkatkan pengetahuan Dewan Pengawas Syari'ah tentang operasional lembaga keuangan syari'ah, serta intensitas keterlibatan DPS dalam program sosialisasi atau promosi pada penduduk lokal, perlu ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan rekomendasi tersebut, keberadaan Dewan Syari'ah Nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah yang dijamin oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tampaknya masih perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknik masing-masing. Hal ini dianggap penting agar para anggota DPS yang ditempatkan di lembaga keuangan syari'ah itu dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien, sehingga jalannya BMT Fajar Bandar Lampung dapat secara murni sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam

- b) Wawancara Dengan Karyawan BMT Fajar Bandar Lampung
- Berdasarkan wawancara dengan Accounting adm. Pembiayaan yaitu Bapak Deni Irwan . Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang diminati banyak orang karena untuk usaha yang produktif . Pembiayaan ini dalam bentuk modal atau dana yang di berikan BMT Fajar untuk anggota yang di kelola dalam suatu usaha . Selama menerangkan Anggota diberikan formulir pengajuan, jaminan, margin yang ditawarkan oleh BMT Fajar Bandar

Lampung dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Dan harus disertakan jaminan minimal senilai dengan jumlah pembiayaan yang diajukan. Pihak BMT Fajar menjelaskan guna disertakan jaminan pada BMT Fajar yaitu untuk mencegah kecurangan nasabah, dan sebagai asset penentu yang mampu menyelamatkan nasabah apabila nantinya tidak dapat mengangsur atau bermasalah. Dan peranan DPS hanya untuk mengontrol dan mengawasi apakah produk-produk BMT sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di DSN-MUI yang mengawasi pelaksanaan keputusan DSN dilembaga keuangan mikro syariah..

Dalam pengambilan pembiayaan 5C merupakan satu alat untuk melihat sejauh mana kelayakan kredit yang akan diberikan kepada calon debitur dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu keputusan kredit ditentukan oleh prinsip “5C” yaitu *Collateral* (Jaminan) Merupakan jaminan berupa barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan suatu jaminan bagi calon anggota untuk mengajukan pembiayaan konsumtif pada BMT. Jaminan yang diberikan sesuai dengan besaran pembiayaan yang akan diberikan. Jaminan yang diberikan calon anggota biasanya berupa tanah, BPKB kendaraan, dan barang yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analisis

pembiayaan dan dapat di jadikan pembiayaan . penilaian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa jika terjadi suatu resiko kegagalan dalam pembayaran pembiayaan, maka jaminan di pakai untuk penganti dari kewajibannya. Nilai jual jaminan harus bisa menutupi pembiayaan serta bagi hasil atau marginnya. Dan apabila nilai jaminan lebih, maka kelebihan dana tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya

c) Wawancara Dengan Para Anggota Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan wawancara dengan anggota pembiayaan murabahah mengatakan bahwa, pembiayaan murabahah yang di berikan oleh pihak BMT Fajar Bandar Lampung. Pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan yang di berikan pihak BMT Fajar kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban mengungkapkan kepada pembeli mengenai harga pokok dari barang dan marjin keuntungan yang dimasukan ke dalam harga jual barang tersebut. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan tunai atau tangguh. Barang yang di perjual belikan haruslah barang-barang dan bukan berupa dokumen-dokumen kredit. Pada produk murabahah produk yang ditawarkan juga beranekaragaman dengan kualitas yang harus sesuai keinginan kita dan yang pasti BMT Fajar Bandar Lampung menawarkan atau memberikan pembiayaan untuk produk

yang halal, kalau untuk jamin-jaminan produk, BMT fajar Bandar Lampung memberikan ganti bila produk tersebut rusak yang bukan disebabkan oleh kita sendiri (anggota).

Menurut bapak Harjadi Jumadi yang merupakan anggota BMT Fajar yang mengambil pembiayaan *murabahah*, mengatakan bahwa tidak mempersulit anggota dalam meminjam dana di BMT Fajar asal sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Fajar seperti KTP, KK, dan persyaratan lainnya. Peminjaman dana yang telah memenuhi persyaratan pihak BMT bisa langsung memproses dana yang ingin di pinjam. Prosedur pencairan dana di BMT Fajar sangat cepat dikarenakan sebelum melakukan pembiayaan pihak BMT telah mensurvei langsung ke alamat yang telah di cantumkan oleh pihak peminjam atau anggota. Pembiayaan di lakukan secara terang menerang dari pihak BMT Fajar dan pembiayaan dilakukan sesuai dengan yang telah di sepakati antara pihak peminjam dan pihak BMT.

Barang yang bisa di jadikan jaminan kepada pihak BMT Fajar salah satunya seperti surat-surat berharga yaitu BPKB Motor, BPKB Mobil, Surat Tanah, dll. Yang memiliki nilai jual. Jaminan ditetapkan sesuai dengan berapa jumlah nominal yang di pinjam.

d) Peranan Dewan Pengawas Syari'ah dalam Mengawasi Produk.

Melihat dari pengawasan DPS yang mengawasi BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Sehingga masyarakat mempercayai produk-produk yang ada di BTM BiMU dan BMT Fajar. khususnya produk *Murabahah* yang memang produk ini sangat membantu dalam pengambilan modal untuk mengembangkan usaha. karena prosesnya yang cepat dan jaminannya yang tidak memberatkan anggota pada pengambilan produk pembiayaan *murabahah*. Sehingga naiknya minat anggota dalam pengambilan produk *murabahah* di BTM BiMU Bandar Lampung maupun BMT Fajar Bandar Lampung sangat berpengaruh dalam naiknya pendapatan dari BMT itu sendiri.

DPS melakukan pengecekan syari'ah pada BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung untuk memeriksa sejauh mana aktifitas BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung sesuai atau tidak dengan prinsip syari'ah, Jadi DPS dapat memastikan bahwa BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung sudah sejalan dengan prinsip syari'ah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam Peningkatan Anggota pada produk pembiayaan Murabahah di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.

Berdasarkan dari uraian-uraian landasan teori dan hasil penelitian yang ada dalam skripsi ini, Peranan Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dalam peningkatan Anggota. Dewan Pengawas Syari'ah adalah tokoh kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional bank atau lembaga keuangan syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah. Pembinaan dan pengawasan khusus dalam perbankan dan lembaga keuangan syari'ah sekaligus bertujuan untuk mengupayakan pemurnian BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung agar benar-benar sejalan dengan jiwa ketentuan syariat Islam yang harus dimulai dari mengefektifkan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ditempatkan pada BMT. Dapat di simpulkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah merupakan pengawasan dalam lembaga keuangan syari'ah yang mengawasi produk yang dikeluarkan oleh perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah sesuai atau tidaknya dengan Dewan Syari'ah Nasional.

Upaya untuk meningkatkan pengetahuan Dewan Pengawas Syari'ah tentang operasional perbankan, serta intensitas keterlibatan DPS dalam program sosialisasi atau promosi pada penduduk lokal, perlu ditingkatkan. Dalam kaitannya dengan rekomendasi tersebut, keberadaan Dewan Syari'ah

Nasional dan Dewan Pengawas Syari'ah yang di jamin oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tampaknya masih perlu dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknik masing-masing. Sehingga jalannya BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung dapat secara murni sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dewan Pengawas Syari'ah Mengawasi usaha BMT terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI yang sampai sejauh ini terkaid dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) *murabahah*. Produk yang paling banyak di minati di BMT yaitu produk *Murabahah* karena membiayai usaha pedagang-pedagang kecil. Dan dalam penilaian aspek syari'ah suatu produk dinilai memenuhi prinsip-prinsip syari'ah apabila produk tersebut sudah memenuhi standar dari akad tersebut yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau sudah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN. Terkait dengan produk *murabahah*.

Dewan Pengawas Syari'ah tidak berkerja sendiri tetapi juga di bantu oleh pihak satuan pengawaasan internal untuk mengecek dokumen-dokumen yang di butuhkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Apabila dalam pengecekan sudah memenuhi SOP (Standar Operasional Prosedur) produk syari'ah secara otomatis sesuai dengan syari'ah. Melihat dari pengawasan DPS yang mengawasi BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung sudah sesuai dengan prinsip syari'ah. Sehingga masyarakat mempercayai produk-produk yang ada di BTM BiMU dan BMT Fajar. khususnya produk

Murabahah yang memang produk ini sangat membantu dalam pengambilan modal untuk mengembangkan usaha. karena prosesnya yang cepat dan jaminannya yang tidak memberatkan anggota pada pengambilan produk pembiayaan *murabahah*. Sehingga naiknya minat anggota dalam pengambilan produk *murabahah* di BTM BiMU Bandar Lampung maupun BMT Fajar Bandar Lampung sangat berpengaruh dalam naiknya pendapatan dari BMT itu sendiri.

1. Adanya DPS BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar

Lampung. Tidak dapat di dikategori profesional kinerjanya karena kinerjanya :

- a. Para anggota tidak memiliki adanya tuntunan bahwa seorang profesional bekerja keras penuh waktu (*full time*) yang di dukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syari'ah yang telah ditentukan dengan peraturan oleh peraturan yang berlaku pada semua anggota DPS.
- b. Para anggota DPS ada masa kita ini tingkat konsistennya masih sangat pasif.
- c. Tidak secara rutin melakukan pengawasan pada BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Lampung serta tidak melakukan tindakan diskusi tentang masalah-masalah Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun finansial organisasi yang ada.

- d. Para anggota DPS sebagai pengawas dan penasehat pada BTM BiMU dan BMT Fajar datang jika diperlukan saja.

Menceminkan pernyataan diatas ternyata selama ini kinerja DPS belum bekerja sesuai dengan kewajibannya sebagai DPS dan belum efektif. Tentunya dengan tidak efektifnya kinerja DPS akan menimbulkan pertanyaan apakah anggota DPS memang tidak diberikan meja atau ruang khusus.

Objek pembiayaan *murabahah* ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan calon anggota. Dalam hal ini di antara anggota BTM BiMU dan BMT Fajar harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba dan barang yang diperjualbelikan harus halal dan bermanfaat. BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi dimulai dari minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, dan margin keuntungan yang diperoleh di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.

DPS melakukan pengawasan syari'ah pada BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung untuk memeriksa sejauh mana aktifitas BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung sesuai atau tidak dengan prinsip syari'ah, Jadi DPS dapat memastikan bahwa BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung sudah sejalan dengan prinsip syari'ah dan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

B. Peran Dewan Pengawas Syari'ah dalam Peningkatan anggota pada Produk pembiayaan *Murabahah* di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung dalam Presfektif Islam.

Peranan utama dalam Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi jalannya operasional bank dan lembaga keuangan non bank agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah. Hal ini karena transaksi yang dilakukan di bank syari'ah maupun lembaga keuangan syari'ah sangat khusus di bandingkan dengan bank konvensional.

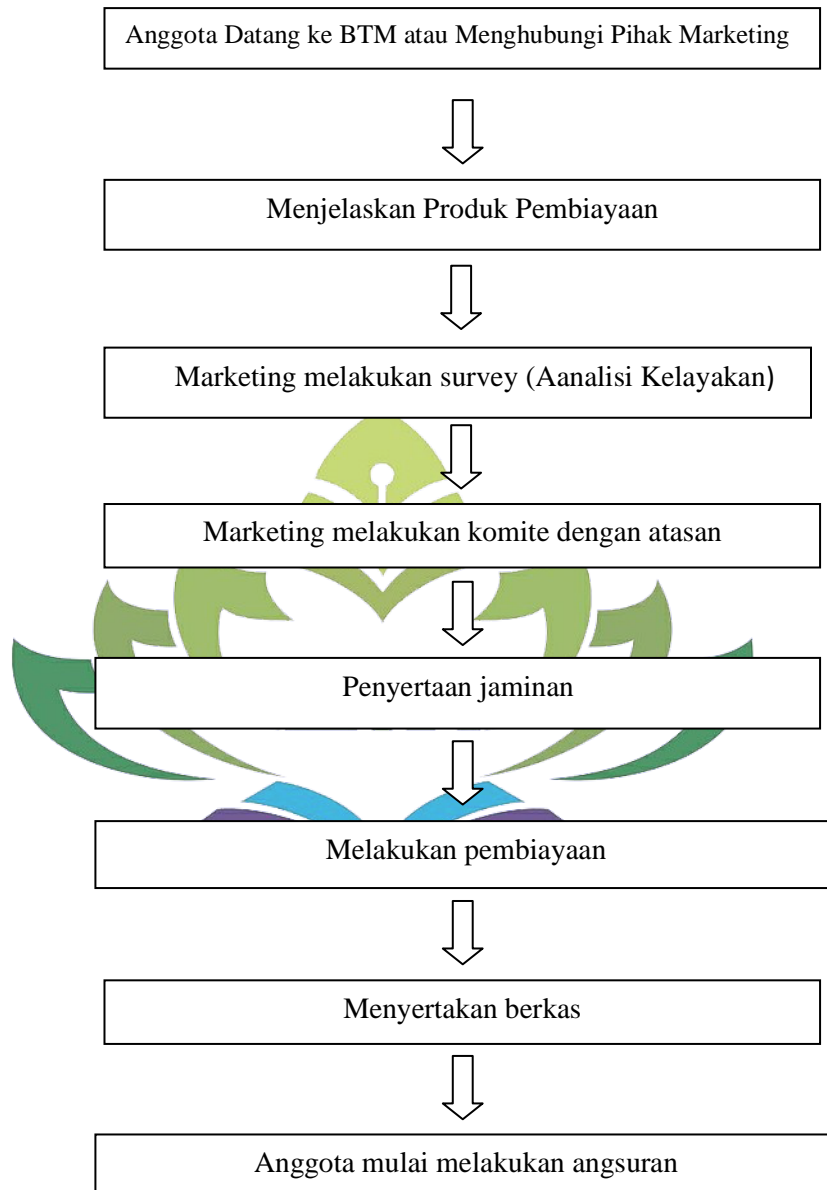
Dewan Pengawas Syari'ah memainkan perannya yang sangat penting. DPS tidak melakukannya sendiri, melainkan bekerja sama dengan pihak Legal. Dua pihak ini berdiskusi berkaitan dengan akad-akad yang sudah ada pada produk yang ada di BMT BiMU Bandar Lampung maupun BMT Fajar BandarLampung. Sebelum mengeluarkan suatu produk, produk tersebut dipasarkan pada masyarakat tentunya produk tersebut sudah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang telah di tetapkan. Sehubungan dengan kelayakan suatu produk yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga keuangan syari'ah yang telah di buat oleh pihak Legal. Berdasarkan wawancara dengan kabag Legal yaitu Bapak Rahmat Habibi, pembiayaan *murabahah* termasuk pembiayaan yang banyak di minati oleh anggota. Karena sangat membantu dalam mengembangkan usaha dan syarat pembiayaan yang lebih ekonomis sehingga mempermudah anggota dalam pengambilan pembiayaan . Pembiayaan yang di lakukan pihak BMT BiMU Bandar Lampung memiliki

prinsip dasar yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Capital* (harta), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi).

Peranan dari DPS itu sendiri untuk mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI. Seperti yang di ungkapkan dari Bapak Sutrisno yang merupakan anggota BTM yang mengambil pembiayaan *Murabahah*, mengatakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh BTM BiMU sangat membantu karena BTM tidak menyulitkan dalam pembiayaan dan pengajuan pembiayaan. Karena memiliki prosedur yang lebih cepat . dan bisa dengan waktu yang sangat singkat karena sebelum melakukan pembiayaannya di survei dari pihak BTM BiMU ke tempat tinggal yang bersangkutan dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Seperti, KTP, KK, dan Persyaratan lainnya yang sudah termasuk ketentuan oleh pihak BTM BiMU Bandar Lampung. Menurut penulis penerapannya sudah bagus terdapat proses Ijab dan Qabul antara Anggota dan BMT. Hal tersebut sudah memenuhi rukun dari akad *murabahah* yang ada.

Gambar 1.1

1. Bagan Alur Pembiayaan Murabahah



Keterangan :

- a. Calon anggota datang ke Baitul mal Tamwil dan menghubungi pihak marketing baik melalui terpon maupun langsung untuk mengajukan pembiayaan.

b. Menerapkan pembiayaan konsumtif yang menerangkan tentang produk-produk apa saja yang ada di BMT itu sendiri. Selama menerangkan anggota di berikan formulir pengajuan akad yang ingin di ambil oleh anggota. Menjelaskan syarat-syarat pengajuannya, jaminan, margin, yang ditawarkan oleh BMT 0-20% atau sesuai kemampuan dari anggota itu sendiri dalam waktu 115 hari atau dengan kesepakatan bersama. Dan jaminan yang harus disertakan oleh nasabah yakni minimal sejumlah dengan pembiayaan yang di ajukan. Pihak BMT juga menjelaskan di awal maksud kegunaan jaminan untuk mencegah kecurangan anggota, dan sebagai asset penentu yang mampu menyelamatkan nasabah jika tidak dapat mengangsur atau bermasalah.

c. Setelah semua telah di lakukan detail dan pihak BMT telah menyetujuinya maka tindakan lanjutnya yaitu inisiasi. Tuga pentingnya yakni.

1) Mengecek kelengkapan berkas seperti jaminan anggota.

Kelengkapan berkas wajib di lengkapi seperti:

- a) Formulir pengajuan pembiayaan
- b) Fotocopi KTP suami Istri (bagi yang sudah menikah)
- c) Fotocopi KK dan surat nikah.
- d) Surat pernyataan belum menikah (bagi yang belum menikah)

- e) Surat keterangan domisili apabila permohonan bertempat tinggal tidak menetap
 - f) Peta lokasi rumah
- d. Bila berkas awal telah lengkap dan bisa untuk ditindak lanjuti, maka dari peta lokasi yang diberikan calon anggota di atas, pihak BMT melakukan survey lapangan guna menganalisis layak tidaknya calon anggota diberikan pembiayaan komsuftif. ketika survey lapangan menggunakan prinsip 5c yaitu :

1) *Character* (keperibadian)

Calon Anggota pembiayaan *murabahah* harus dilihat dari karakter atau kepribadiannya agar seluruh kewajibannya bisa dijadikan komitmen yang tinggi sebagai gambaran tanggungjawab terhadap kewajibannya kepada semua pihak yang terhubung. Contohnya kebiasaan buruk menjual minuman keras, menjual obat terlarang, berjudi dan lain-lain. Sifat-sifat di atas turut menentukan dalam penilaian karakter.

2) *Capacity* (kemampuan membayar)

Kemampuan calon anggotanya untuk mengelola usahanya diperkirakan dapat menghasilkan laba dan dapat membayar kewajibannya dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Tentu saja ini sangat berkaitan dengan pengalaman usaha sebelumnya dengan manajemen yang harus lebih baik.

3) *Capital* (harta yang di miliki)

Pihak BMT harus melihat seberapa besar tingkat keyakinan dari calon anggota terhadap usahanya yang akan di jalannya. Jika calon anggota sendiri tidak yakin dengan usahanya, maka orang lain pun tidak akan yakin dengan usaha yang akan di jalannya. Di lihat dari calon anggotanya apakah memiliki simpanan di BMT termasuk simpanan di lembaga keuangan lainnya. Dan apakah calon anggota memiliki pembayaran tetap untuk pembayaran angsuran.

4) *Condition* (kondisi usaha)

Dilihat dari kondisi letak usahanya, jumlah pesaingnya yang ada di lokasi tersebut serta bentuk usaha apa yang di Lakukan oleh calon anggota. Serta barang-barang yang bagaimana yang di perjual belikan oleh calon anggota.

5) *Collateral* (Jaminan atau Anggunan)

Jaminan berupa barang berharga yang di miliki calon anggota yang memiliki nilai jual untuk di jadikan jaminan bagi calon anggota. Jaminan yang di berikan calon anggota harus sesuai dengan besaran pinjaman yang di pinjam oleh calon anggota. Jaminan yang di anggap memiliki nilai jual yaitu seperti berikut : Surat tanah, BPKB kendaraan, Sertifikat Rumah, dan barang yang sekiranya bisa di

analisis pembiayaan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Penilaian ini untuk menghindari terjadinya suatu resiko kegagalan dalam pembayaran pembiayaan. Nilai jual jaminan harus bisa menutupi pembayaran pembiayaan, maka jaminan tersebut di pakai untuk penganti dari kewajibannya.

- e. Apabila survey telah dilakukan oleh pihak BMT, lalu mereka menjelaskan hasilnya ketika rapat komite. Dana apabila dinyatakan layak, maka pihak BMT menelpon anggota untuk melakukan akad di hari yang telah di tentukan oleh BMT dan anggota melakukan negoisasi dimulai total pinjaman nasabah yang kadang tidak dapat diberikan BMT secara sesuai pengajuan, negoisasi margin yang biasanya diajukan anggota untuk meminta margin yang biasanya diajukan anggota untuk meminta margin yang lebih kecil dari penawaran BMT, serta membahas mengenai lamanya angsuran yang di sanggupi anggota dan tidak merugikan BMT.
- f. Apabila titik kesepakatan telah di capai oleh BTM dan Anggota, maka BMT memberikan berkas surat atas jaminan yang harus di isi anggota saat itu juga dengan materai yang sebagai penguat berkas lalu menyerahkan jaminan asli yang dimiliki oleh anggota untuk pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*.

- g. Pada hari yang sama pula, uang diberikan kepada anggota untuk melakukan pembelian barang di ajukan oleh anggota.
- h. Keesokan harinya, anggota wajib mendatangi kembali kantor BMT dengan menyerahkan berkas berupa bukti kwitansi atau bukti pelunasan atas pembelian barang yang sesuai dengan akad diawal`
- i. Apabila semua urusan telah selesai, pihak BMT akan memberikan buku tabungan angsuran yang harus dibayar anggota sesuai kesepakatan apakah perhari atau perminggu asalkan dalam 1 bulan harus cukup.

Murabahah adalah Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Untuk masalah *murabahah* konsep yang dipakai adalah kaidah umum yang berpijakan pada:

لا ضرر ولا ضرار


Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.

عن ابي هريرة رفعه قال اب الله يقول انا ثالث الشريكيب ما لم يخن احدهما صاحبه

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa jalla berfirman, Aku Pihak ketiga dari dua orang

*yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.
(HR. Abu Daud no.2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim.*

Penilaian suatu produk tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang mengacu pada SOP (Standar Operasional Produk) dan Fatwa-fatwa DSN-MUI. Dewan Pengawas Syari'ah juga harus mengikuti perkembangan dari Fatwa-fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Lembaga Keuangan Syari'ah dengan ketentuan dan prinsip syari'ah bahwa Dewan Pengawas Syari'ah bekerja sesuai dengan Prespektif Islam.



Perspektif Islam merupakan sistem hukum yang moralitas yang komperhensif dan meliputi seluruh wilayah kehidupan manusia. Semua cara pandang yang berlandasan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syariat Allah SWT. Perspektif Islam bagi umat Islam berfungsi sebagai sumber serangkaian kriteria-kriteria mana yang benar dan mana yang buruk yang sesuai dengan syariat Islam. Semata-mata untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT. Syari'ah menekankan pentingnya umatnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam sekaligus meningkatkan martabatnya sebagai hamba Allah SWT dan dapat dipercaya pelaksanaan kegiatan yang ada di BMT BiMU BandarLampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.

2. Perbandingan antara BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung.

a. BMT BiMU Bandar Lampung

1) Visi BiMU adalah “ Menjadi Koperasi Syariah Pilihan Utama Masyarakat dalam Mendukung Gerakan Dakwah Ekonomi Muhammadiyah

2) Misi BTM BiMU :

a) Mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan sistem ekonomi Islam .

b) Menyajikan Produk-Produk transaksi syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan anggota.

c) Memberikan pelayanan terbaik. Transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

d) Melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang lembaga keuangan syariah, mampu berkompetisi dan berakhlak karimah.

e) Mengembangkan kerjasama dengan baik dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam meningkatkan perekonomian umat.

3) BTM BiMU Bandar Lampung merupakan pusat BTM yang ada di Bandar Lampung dan memiliki beberapa kantor cabang yang ada di Bandar Lampung.



- 4) Kantor pusat BMT BiMU ini hanya memiliki 1 DPS aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pengawasan dan tidak bekerja secara tim. Melainkan dikarenakan hanya 1 DPS yang ada di BTM BiMU itu sendiri pihak staf pun membantu dalam tugas-tugas pengawasannya.
- 5) Dilihat dari jumlah data anggota dari 2015-2017 BMT BiMU memiliki anggota sebanyak 2918 anggota baik saat ini masih aktif atau tidak. Tetapi termasuk BMT yang berkembang dan selalu memiliki peningkatan anggota.

b. BMT Fajar Bandar Lampung

- 1) Visi BMT Fajar adalah terwujudnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang konsisten dan terdepan dalam menerapkan syari'ah untuk kesejahteraan dan kejayaan ummat.

2) Misi

- a) Mendorong prakarsa dan kemandirian usaha mikro kecil dan usaha menengah.
 - b) Membela dan memperjuangkan hak-hak ekonomi rakyat.
 - c) Menegakkan sistem muamalah iqtishadiyah (Ekonomi Islam) berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
- 3) BMT Fajar Bandar Lampung merupakan kantor cabang BMT Fajar Pusat yang ada di kota Metro.
 - 4) Kantor ca

Menurut pandangan peneliti prosedur tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam menjalankan suatu usaha tentulah keuntungan yang menjadi tujuan utama. Islam sendiri telah mengatur bahwa inti dari jual beli adalah unsur kerelaan atas dasar suka sama suka, ataupun tidak ada unsur keterpaksaan antara pihak penjual dan pembeli. Seperti yang di jelaskan dalam Qs. An-Nisa :4/29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa menurut perspektif Islam, yang dilaksanakan di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung merupakan pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan Islam dengan didasarkan pada Al-Quran dan Hadis. Selain itu pembiayaan yang dilaksanakan memiliki standar kelayakan dalam pengambilan pembiayaan sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI. Dan kegiatan pembiayaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis data yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syari'ah berupaya mengawasi usaha BMT terkait dengan akad-akadnya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan Fatwa DSN-MUI yang sampai sejauh ini terkait dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) *murabahah*. Produk yang paling diminati di BTM BiMU dan BMT Fajar yaitu produk *Murabahah* karena membiayai usaha pedagang-pedagang kecil. Dan dalam penilaian aspek syari'ah suatu produk dinilai memenuhi prinsip-prinsip syari'ah apabila produk tersebut sudah memenuhi standar dari akad tersebut yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau sudah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN-MUI. Terkait dengan produk *murabahah*.
2. Dewan Pengawas Syari'ah dalam perspektif Islam telah melaksanakan peranannya dengan pembiayaan *Murabahah*. Mengawasi kehalalan akad pembiayaan *murabahah* pada BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung dengan melakukan pada aturan-aturan syariat Islam. Serta melakukan pengawasan terhadap proses pembiayaan yang cepat dan jaminan yang tidak memberatkan anggota pada pengambilan produk pembiayaan *murabahah*. Sehingga naiknya minat anggota dalam

pengambilan produk *murabahah* di BTM BiMU Bandar Lampung dan BMT Fajar Bandar Lampung membuat naiknya pendapatan BMT itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, sebagai upaya dalam pemahaman tentang Peranan Dewan Pengawas Syari'ah dalam Peningkatan Anggota, adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Keuangan syari'ah BTM BiMU BandarLampung sebaiknya DPS yang sudah tidak aktif dalam menjalankan tugas, dan fungsinya lebih baik di gantikan dengan DPS yang memang benar-benar menjalankan wewenangnya bukan hanya sekedar pajangan nama yang ada di struktur Dewan Pengawasan Syari'ah. Dan sebaiknya memaksimalkan dalam kinerja DPS dalam menjamin bahwa BMT yang mereka awasi sudah terlaksana dengan baik atau tidak maka baiknya ada semacam cek list kepada semua kegiatan yang telah tercapai oleh BMT.
2. Untuk para anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi BMT Fajar BandarLampung untuk lebih mengutamakan Tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai fungsi adanya Dewan Pengawas Syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah lebih efektif sesuai dengan SOP (Standar Operasional Produk) yang telah ada dalam mekanisme produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hayyi, "Efektivitas Pengawasan Bank Syariah; Studi terhadap Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah Kota Mataram," Thesis: UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2011
- Andri soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah* Jakarta: Kencana prenatal media group, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik*, Jakarta : Gema Insaini Press, 2001
- Ascarya, *Akad dan produk bank syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RAJAGRASINDO, 2007.
- Barlitik Sukma dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Hukum UI
- BTM BiMU.id(on-line), di ambil pukul 11 maret 2018
- Chapra, M.U. and Ahmed, H., "Corporate Governance in Islamic Financial Institutions," Occasional Paper No.6, Jeddah: Islamic Research & Training Institute/ Islamic Development Bank, 2002
- Dani El Qori, "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah: Studi pada BPD DIY Syariah," Thesis: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2012
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ghufron Safiniah, *Sistem Dan Mekanisme pengawasan syariah* Jakarta : 2007
- Harahap Sofyan, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Tim Quantum, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali, 2010
- Hertanto Widodo, *Panduan Praktik Operasional Baitul Mal Tamwil*, Jakarta : Mizan cet 1 Syaban, 1999
- http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=55:tentang-dewan-syariah-nasional&catid=39:dewan-syariah-nasional&itemid=58
(diakses tanggal 27 maret 2018)
- <http://btmbimu.id/>, pukul 10.30, 23 januari 2018.
- <http://btmbimu.id/>, pukul 10.30, 23 januari 2018.

<http://punyaudin.blogspot.co.id/2008/08/prosedur-pendirian-bmt-.html>

<https://doi.org/10.9744/jmk.9.1.pp.%2073-81>

Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muamalah, Ibadah Muamalah*, Jakarta ; Pusat Amani, 2007

Ismail.,Mba., ak,*Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana,2011

Koetaranigrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia,2007

Lexy. J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya,2008

M. Syafe'i Antonio , *Bank Syariah dan Teori ke Praktik* , Jakarta : Gema Insani, 2001

Mahtarom, Problem Yuridis Lembaga Keuangan Baitul Mal Wat Tamwil dalam perspektif sistem hukum lembaga keuangan di Indonesia. *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Utama Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2004

Muhamad Sadi, *Konsep hukum perbankan syariah*, Jakarta:Setara press,2015

Muhammad Firdaus NH Dkk, *fatwa-fatwa ekonomi syariah kontemporer*, Jakarta : Renaisan, 2007

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007

Nasser, K, Jamal A. and Khatib K, "Islamic Banking: a Study of Costumer Satisfaction and Preferences in Jordan," *International Journal of Banking Marketing*,Vol.177

Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah* , widoarjo :Masran, 2009

Nurul Hudadan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010

Pabudu Tika, *Metode Riset Bisnis* , Jakarta: Bumi Aksa,2006

Rivai Veitzhal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Grafindo, 2012

Sugiono, *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,2012

Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta,2004

Sumandi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011

Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam pemasaran* , Jakarta : PT Asdi Mahastya, 2003

Susanto Burhanudin, *hukum Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta:Uii Pers. 2008

Warkum Sumitra, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait BMI Dan Takaful Di Indonesia* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002

Wiroso, *Murabahah*, Yogyakarta:Uii Press,2005

www.mui.or.id/konten / mengenai-mui/sekitartentangkami(diakses tanggal 27 maret 2018).

Yeni Salam Barlinti, *kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2010

Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Managemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Pustaka Alvabel, 2006

